

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KOLAKA

2020



MEKONGGA

<https://kolakakab.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KOLAKA 2020

ISSN : 2621-6337
Nomor Publikasi : 74040.2049
Katalog BPS : 4102004.7404

Ukuran Buku : 17,5 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi + 90 halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka

Dicetak Oleh:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN KOLAKA 2020

Tim Penyusun:

Penanggungjawab Umum : Ade Ida Mane, SST, M.Si

Penyunting : Fitri Permata Sari, SST

Penulis : Fitri Permata Sari, SST

Pengolah Data : Fitri Permata Sari, SST

<https://kolakakab.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kolaka 2020 memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Kolaka yang sumber data utamanya merupakan hasil pengumpulan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, taraf kesejahteraan dikaji menurut tujuh bidang yang mencakup Kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Konsumsi dan Pengeluaran, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kolaka. Data yang disajikan pada publikasi ini umumnya adalah angka persentase dari suatu populasi pada tingkat kabupaten.

Dengan terbitnya buku ini, diharapkan kebutuhan data indikator kesejahteraan rakyat sebagian besar sudah dapat dipenuhi. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan dan penyempurnaan penerbitan publikasi yang akan datang sangat kami harapkan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan dalam penyelesaian buku ini.

Kolaka, Desember 2020

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kolaka

Ade Ida Mane, SST, M.Si
NIP. 19770926 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Sumber Data	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	4
II. KEPENDUDUKAN	
Konsep dan Definisi	7
2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin	9
2.2 Angka Beban Ketergantungan.....	13
2.3 Status Perkawinan	19
2.4 Kepemilikan Kartu Identitas.....	21
III. PENDIDIKAN	
Konsep dan Definisi	27
3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah	29
3.2 Tingkat Pendidikan	31
3.3 Tingkat Partisipasi Sekolah	32
IV. KESEHATAN	
Konsep dan Definisi	37
4.1 Status Kesehatan Masyarakat	39

4.2	Akses Pelayanan Kesehatan	41
4.3	Kesehatan Ibu dan Anak	43
4.4	Perilaku Merokok	46
V.	PERUMAHAN	
	Konsep dan Definisi	51
5.1	Kepemilikan Rumah	53
5.2	Sumber Air	55
5.3	Sanitasi	58
VI.	KONSUMSI DAN PENGELUARAN	
	Konsep dan Definisi	63
6.1	Pengeluaran Rumah Tangga	64
6.2	Konsumsi Kalori dan Protein	70
VII.	SOSIAL LAINNYA	
	Konsep dan Definisi	75
7.1	Akses Teknologi, Informasi dan Komunikasi	77
7.2	Program Perlindungan Sosial	82
7.3	Kepemilikan Aset oleh Rumah Tangga	84
	DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR TABEL

KEPENDUDUKAN

Tabel 2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin 2016-2020.....	9
Tabel 2.2. Persentase Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif serta Angka Beban Ketergantungan, 2018-2020	14
Tabel 2.3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan (Persen), 2018-2020.....	20
Tabel 2.4. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan (Persen), 2020.....	21
Tabel 2.5. Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020	23

PENDIDIKAN

Tabel 3.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kolaka (Tahun), 2018-2019	30
Tabel 3.2. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin (Persen), 2018-2019	31
Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2018-2019	33

KESEHATAN

Tabel 4.1. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020	42
Tabel 4.2. Persentase Baduta yang Pernah Diberi Air Susu Ibu (ASI) Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020	43

Tabel 4.3. Perilaku Merokok Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020.....	47
--	----

PERUMAHAN

Tabel 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati dan Jenis Kelamin KRT (Persen), 2020	54
Tabel 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati (Persen), 2020	55
Tabel 5.3. Persentase Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Pendidikan Tertinggi KRT (Persen), 2020	60

KONSUMSI DAN PENGELUARAN

Tabel 6.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2020.....	65
Tabel 6.2. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020	68
Tabel 6.3. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Pengeluaran, 2020.....	70

SOSIAL LAINNYA

Tabel 6.1. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2020.....	65
Tabel 6.2. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020	68
Tabel 6.3. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Pengeluaran, 2020.....	70

DAFTAR GAMBAR

KEPENDUDUKAN

Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen), 2016-2020	10
Gambar 2.2. Piramida Penduduk Kolaka (Persen), 2020.....	12
Gambar 2.3. Perkembangan Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif (Persen), 2018-2020.....	13
Gambar 2.4. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktivitas (Persen), 2020	15
Gambar 2.5. Laju Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif dan Usia Belum/Tidak Produktif Lagi (Persen), 2016-2020.....	16
Gambar 2.6. Persentase Penduduk Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020.....	17
Gambar 2.7. Persentase Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020.....	18
Gambar 2.8. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan (Persen), 2020	19
Gambar 2.9. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Pendidikan Tertinggi KRT (Persen), 2020.....	22

KESEHATAN

Gambar 4.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020.....	40
Gambar 4.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan (Persen), 2020.....	41
Gambar 4.3. Persentase Balita (umur 0-59 bulan) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020.....	45

Gambar 4.4. Perilaku Merokok Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Persen), 2020	46
---	----

PERUMAHAN

Gambar 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Untuk Mandi/Cuci/Lainnya (Persen), 2020	56
---	----

Gambar 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Sumber Air Utama yang Digunakan Untuk Mandi/Cuci/Lainnya (Persen), 2020	57
--	----

Gambar 5.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Persen), 2020	58
--	----

KONSUMSI DAN PENGELUARAN

Gambar 6.1. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Kelompok Makanan (Persen), 2020	66
---	----

Gambar 6.2. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Kelompok Bukan Makanan (Persen), 2020	67
---	----

SOSIAL LAINNYA

Gambar 7.1. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Keatas Menurut Penggunaan Teknologi Informasi (Persen), 2020	78
---	----

Gambar 7.2. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Keatas Menurut Kelompok Pengeluaran dan Penggunaan Teknologi Informasi (Persen), 2020	79
--	----

Gambar 7.3. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Penggunaan Teknologi Informasi (Persen), 2020	80
--	----

Gambar 7.4. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Keatas Menurut Kelompok Pengeluaran dan Akses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir (Persen), 2020	81
--	----

Gambar 7.5. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Keatas yang Mengakses Internet Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir (Persen), 2020	82
--	----

Gambar 7.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima (Persen), 2020	83
Gambar 7.7. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Menurut Jenis Aset (Persen), 2020.....	85

<https://kolakakab.bps.go.id>

<https://kolakakab.bps.go.id>

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk Kabupaten Kolaka tahun 2020 berdasarkan proyeksi penduduk 2015-2025 tercatat sebesar 265.188 jiwa. Meskipun selalu meningkat secara jumlah, laju pertumbuhan penduduk dapat dikatakan cukup terkendali dengan adanya perlambatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk 2,09 persen dan pada tahun 2020 menurun menjadi 1,95 persen. Rasio jenis kelamin Kabupaten Kolaka tahun 2020 sebesar 103,38. Dapat dimaknai bahwa, penduduk laki-laki sekitar 3 persen lebih banyak dibandingkan perempuan.

Rasio ketergantungan Kabupaten Kolaka selama periode 2017-2019 terus mengalami penurunan dari 49,53 pada tahun 2017 hingga 48,28 pada tahun 2020. Angka ini dapat dimaknai bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) menanggung beban sekitar 48 sampai 49 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan/atau diatas 65 tahun) pada tahun 2020.

Indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah APS dan APM. Dalam tiga tahun terakhir, secara umum Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kolaka tidak ada gejolak angka yang signifikan pada setiap kelompok usia sekolah. Pada tahun 2020, hampir seluruh anak usia SD yaitu 7-12 tahun sudah bersekolah. Sedangkan pada anak usia 13-15 tahun, dari setiap 100 orang anak, sekitar 95 hingga 96 orang diantaranya sedang sekolah. Dan pada anak usia SMA yaitu 16-18 tahun, setiap 100 anak usia 16-18 tahun, 70 hingga 71 orang diantaranya sedang bersekolah.

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SD tahun 2020 yaitu sebesar 99,20 persen, artinya sekitar 99,20 persen penduduk di Kabupaten Kolaka yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang SD/ sederajat. APM SMP sebesar 72,15 persen, dan APM SMA sebesar 60,66 persen.

Derajat kesehatan merupakan indikator kesehatan yang menangkap fenomena jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Pada tahun 2020 terdapat 13,96 persen penduduk Kolaka memiliki keluhan kesehatan. Dengan kata lain, dari setiap 100 penduduk terdapat sekitar 13 hingga 14 orang yang mengalami keluhan kesehatan pada periode sebulan terakhir waktu pendataan. Berkaitan dengan penggunaan jaminan kesehatan oleh

penduduk yang berobat jalan, masih kurang dari setengahnya yang memanfaatkan layanan jaminan kesehatan tersebut, yaitu hanya sekitar 36,09 persen.

Selain itu, indikator kesehatan lainnya yang patut menjadi perhatian adalah pemberian ASI kepada bayi pada usia 0-23 bulan. Hal ini merupakan bagian penting bagi bayi dalam pemenuhan kebutuhan gizi di masa awal kehidupannya. Di Kolaka, sudah 95,25 persen bayi usia 0-23 bulan pernah mendapatkan asupan ASI. Dan untuk anak usia 0-59 bulan, sebanyak 52,89 persen diantaranya sudah mendapatkan imunisasi secara lengkap.

Kondisi kesehatan masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh perilaku konsumsinya, termasuk perilaku merokok. Pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Kolaka, hampir sepertiganya adalah perokok aktif yaitu sebanyak 29,22 persen.

Pola konsumsi masyarakat Kolaka pada tahun 2019, sebanyak 48,66 persen konsumsi masyarakat dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan makanan, dan 51,34 persennya dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan. Pada tahun 2020 proporsi makanan masyarakat Kolaka sebesar 52,03 persen dan 47,97 persen untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan.

Berkaitan dengan indikator perumahan, hasil pendataan Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa 89,39 persen rumah tangga di Kabupaten Kolaka menempati tempat tinggal dengan status milik sendiri. Sumber air minum terbesar rumah tangga di Kolaka adalah sumur bor/pompa, yaitu mencapai 41,47 persen rumah tangga pengguna. Sisanya, 35,69 persen rumah tangga menggunakan sumur/mata air terlindung sebagai sumber air utamanya; sedangkan pengguna air leding (PDAM) sejumlah 12,81 persen. Berkaitan dengan sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar yang digunakan sendiri pada tahun 2020 sebesar 88,31 persen.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Monitoring terhadap hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan telah bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat



TUJUAN

Menyajikan data level kabupaten sebagai dasar perumusan kebijakan maupun evaluasi program pembangunan daerah



RUANG LINGKUP

Analisis kesejahteraan rakyat menyajikan data dan informasi dari tahun 2018-2020



SUMBER DATA

Badan Pusat Statistik (Susenas dan Data Penduduk Hasil Proyeksi SUPAS 2015)

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, keamanan, politik, dan lain sebagainya. Hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun diakui bahwa keragaman budaya, adat istiadat, sumber daya, keadaan geografis, serta potensi alam yang ada mengakibatkan beragam pula pencapaian hasil-hasil pembangunan antar wilayah. Oleh sebab itu, monitoring terhadap hasil pembangunan mutlak diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga program pembangunan berikutnya dapat lebih dioptimalkan.

Proses pembangunan semacam ini merupakan suatu usaha jangka panjang yang memerlukan data penunjang untuk setiap tahap dan komponennya. Sumber informasi utama mengenai berbagai indikator kesejahteraan rakyat berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Disamping itu juga didukung dengan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2025.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adanya otonomi daerah menjadikan kebutuhan data semakin detail. Data hingga level kabupaten/kota diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai dasar perumusan kebijakan maupun evaluasi program pembangunan daerah. Dengan demikian publikasi ini disusun untuk memenuhi kebutuhan data tentang indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Kolaka. Data yang disajikan diharapkan dapat menggambarkan taraf hidup dan perkembangan kesejahteraan rakyat di Kolaka pada tahun 2020.

1.3 Ruang Lingkup

Analisis kesejahteraan rakyat ini menyajikan data dan informasi pada tahun 2020. Beberapa data disajikan dalam series tiga hingga lima tahun untuk memperkaya makna pada data-data tertentu. Data dan informasi yang disajikan pada analisis ini menggambarkan kondisi Kabupaten Kolaka.

1.4 Sumber Data

Publikasi ini disusun dengan sumber data utama berasal dari hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2020. Susenas merupakan salah satu kegiatan survei yang dirancang oleh BPS dengan maksud untuk mengumpulkan data yang dapat mencerminkan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Data yang dikumpulkan mencakup bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, perumahan, konsumsi/ pengeluaran dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Data ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh berbagai indikator pencapaian kesejahteraan rakyat.

Susenas Maret 2020 dilakukan terhadap 570 rumah tangga sampel yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Kolaka. Hasil proyeksi penduduk 2015-2025 digunakan sebagai data penimbang dalam proses estimasi hasil survei tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kolaka 2020 disajikan dalam 7 bab, yaitu:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kependudukan
- Bab III : Pendidikan
- Bab IV : Kesehatan
- Bab V : Perumahan
- Bab VI : Konsumsi dan Pengeluaran
- Bab VII : Sosial lainnya

KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk

265.188 Jiwa

Laju Pertumbuhan

1,95 Persen

Rasio Jenis Kelamin

103,38



Konsep dan Definisi

- **Angka beban tanggungan/rasio ketergantungan** adalah persentase yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif.
- **Kepadatan penduduk** adalah rata-rata jumlah penduduk per luas wilayah (kilometer persegi).
- **Penduduk** adalah semua orang yang telah berdomisili selama enam bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan dan bertujuan menetap.
- **Penduduk usia produktif** adalah penduduk dengan usia antara 15 sampai 64 tahun.
- **Penduduk usia tidak produktif** adalah penduduk usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun.
- **Piramida penduduk** adalah grafik berbentuk piramida yang merupakan gambaran secara visual dari komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin.
- **Rasio jenis kelamin/sex ratio** adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.
- **Tingkat pertumbuhan penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase.
- **Kelompok ekonomi bawah** merupakan 40 persen masyarakat dengan pengeluaran terendah di Kolaka.
- **Kelompok ekonomi menengah** merupakan 40 persen masyarakat dengan pengeluaran menengah di Kolaka.
- **Kelompok ekonomi atas** merupakan 20 persen masyarakat dengan pengeluaran tertinggi di Kolaka.

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, informasi kependudukan merupakan salah satu data yang strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai sasaran pembangunan melainkan sekaligus sebagai pelaksana pembangunan itu sendiri. Atas dasar pemikiran tersebut, pembangunan suatu wilayah termasuk pembangunan daerah dititikberatkan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas SDM diperlukan karena jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset pembangunan jika kualitasnya baik. Namun sebaliknya, bisa pula menjadi beban pembangunan ketika kualitasnya rendah.

Kualitas SDM yang rendah dapat terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali serta tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan yang layak. Perihal kualitas SDM akan sangat mungkin menimbulkan berbagai masalah kesejahteraan masyarakat. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan meningkatnya angka kematian. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak merata/mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan sebagainya.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi persoalan yang perlu ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk perlu terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Sehingga, kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Persebaran, kepadatan, komposisi, dan struktur penduduk merupakan informasi penting yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan suatu daerah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam bab ini akan diuraikan berbagai indikator kependudukan di Kabupaten Kolaka kondisi tahun 2020.

2.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin

Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah berkaitan erat dengan kondisi kependudukannya. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keberadaan dan kebutuhan penduduk di wilayahnya tersebut.

Jumlah penduduk terus mengalami peningkatan dalam periode empat tahun terakhir. Pada tahun 2016 jumlah penduduk yang berdomisili sebanyak 244.959 jiwa. Dengan adanya perubahan kondisi demografi seperti kelahiran, kematian dan migrasi penduduk menyebabkan jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2020 jumlah penduduk menjadi 265.188 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk setiap tahun disajikan pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin 2016-2020

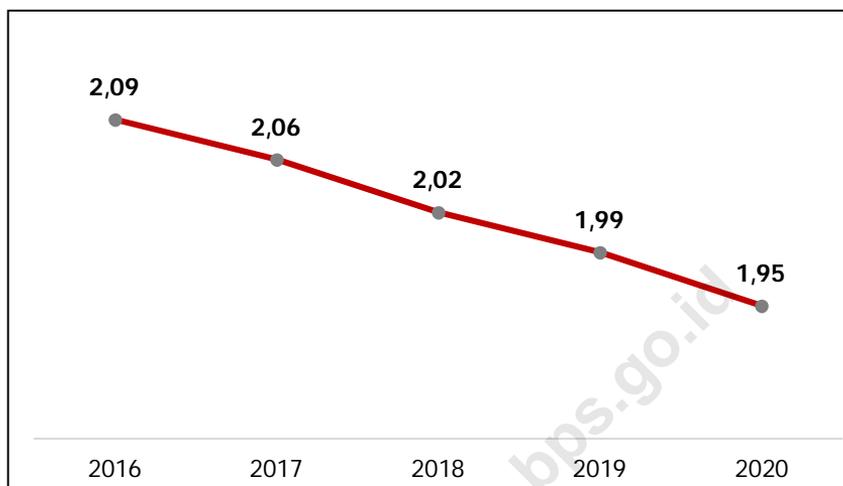
Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	244 959	2,09	103,99
2017	249 997	2,06	103,83
2018	255 050	2,02	103,68
2019	260 117	1,99	103,53
2020	265 188	1,95	103,38

Sumber: Data Penduduk Hasil Proyeksi SUPAS 2015

Secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini bisa dijelaskan melalui indikator rasio jenis kelamin (*Sex Ratio*). Dalam lima tahun terakhir, rasio jenis kelamin berada pada rentang angka 103. Pada tahun 2020, *sex ratio* sebesar 103,38. Artinya, setiap 100 penduduk perempuan, ada sebanyak 103 sampai 104 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki 3 sampai 4 persen lebih banyak dibanding perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin bermanfaat dalam pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender. Sebagai contoh, informasi rasio jenis kelamin diketahui oleh para politisi dalam mempertimbangkan keterwakilan

perempuan dalam parlemen.

Gambar 2.1. Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen), 2016-2020



Sumber: Data Penduduk Hasil Proyeksi SUPAS 2015

Dilihat dari laju pertumbuhan setiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk cenderung menurun. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 1,95 persen atau mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 1,99 persen. Jika diamati selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk terus menunjukkan perlambatan setiap tahunnya. Yaitu dari 2,09 persen pada tahun 2016 menjadi 2,06 persen tahun 2017 dan selanjutnya 2,02 persen di tahun 2018. Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa pertumbuhan penduduk cukup terkendali, jumlah penduduk yang terus bertambah diimbangi dengan laju pertumbuhan yang melambat setiap tahunnya.

Persebaran dan kepadatan penduduk menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya dukung terhadap penduduknya. Persebaran penduduk yang tidak merata mengindikasikan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antara daerah *rural* (perdesaan) dan *urban* (perkotaan). Tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan tidak merata bisa mengakibatkan penyediaan fasilitas umum menjadi relatif tidak tepat guna. Di samping itu, kepadatan yang terlampau tinggi juga akan memicu permasalahan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Umumnya, ada kecenderungan bagi masyarakat untuk memilih bermukim di wilayah yang lebih dekat dengan berbagai fasilitas vital seperti

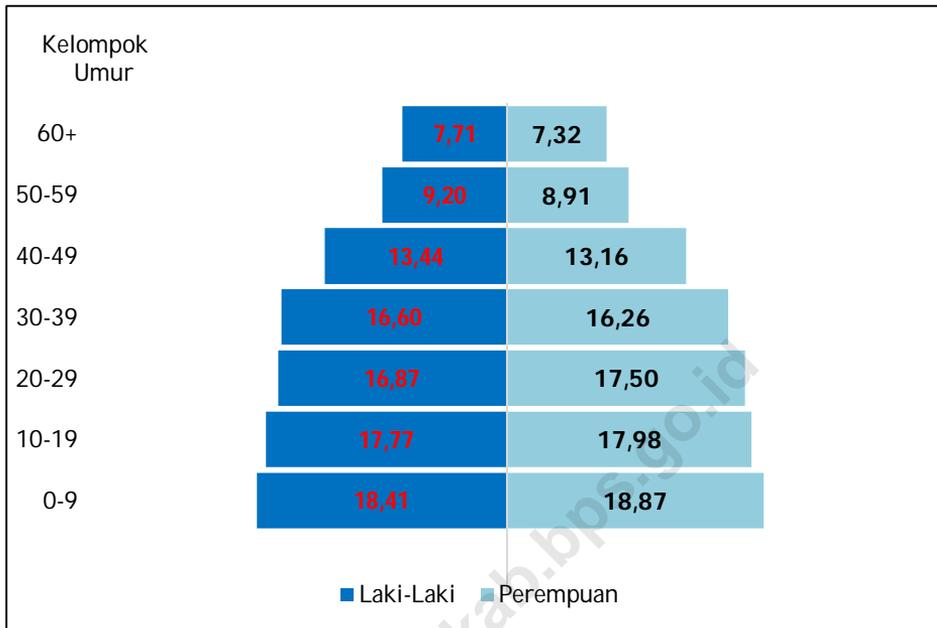
pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.

Kondisi pada tahun 2019, rata-rata kepadatan penduduk yaitu 81 jiwa/km². Kepadatan penduduk dalam bahasan ini tidak mempertimbangkan wilayah pemukiman dengan wilayah bukan pemukiman. Oleh karena itu, luasnya kawasan hutan sangat memengaruhi hasil penghitungan indikator ini. Perkembangan distribusi dan kepadatan penduduk dari tahun ke tahun perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan. Masalah yang sering timbul akibat ketimpangan distribusi dan kepadatan penduduk umumnya berhubungan dengan perumahan, kesehatan, dan keamanan.

Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Lebarnya dasar piramida (gambar 2.2) menunjukkan bahwa penduduk usia muda (dibawah 15 tahun) relatif banyak jumlahnya. Terutama terlihat jelas pada dasar piramida yang terbawah, menunjukkan persentase terbesar dibandingkan kelompok umur lainnya, kondisi ini berarti bahwa komposisi penduduk terbesar berada pada kelompok umur 0-9 tahun baik penduduk laki-laki (18,41 persen) maupun perempuan (18,87 persen).

Gambar 2.2. Piramida Penduduk Kolaka (Persen), 2020



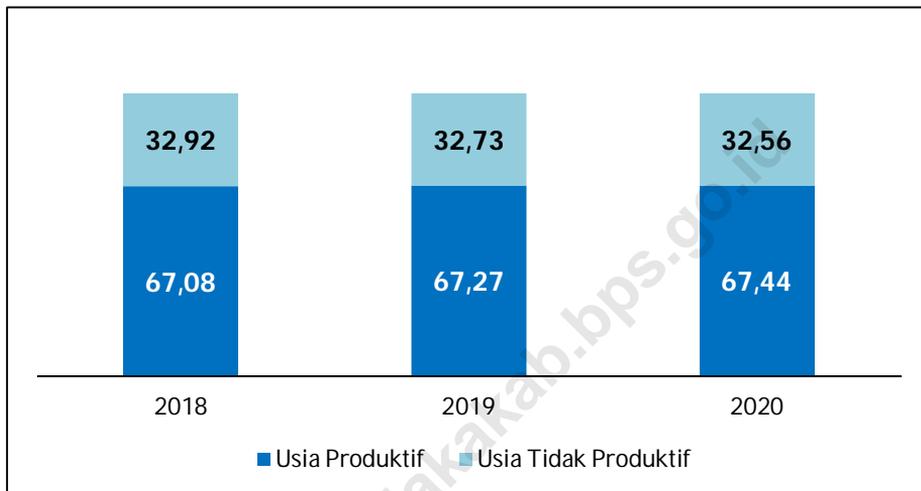
Sumber: Data Penduduk Hasil Proyeksi SUPAS 2015

Jika diamati perbandingan komposisi penduduk dengan tahun sebelumnya, terjadi sedikit penurunan persentase secara total pada penduduk kelompok umur 0-9 tahun. Pada tahun 2019, kelompok umur 0-9 tahun 18,82 persen, namun tahun ini menjadi 18,64 persen atau turun sekitar 0,18 persen dalam waktu satu tahun. Kelompok umur lainnya yang mengalami penurunan secara proporsi yaitu penduduk usia 10-19 tahun, 20-29 tahun dan 30-39 tahun. Di sisi lain, penduduk kelompok usia 40-49 tahun, 50-59 tahun, dan 60 tahun ke atas mengalami peningkatan secara proporsi terhadap keseluruhan penduduk di Kabupaten Kolaka. Fenomena menurunnya persentase penduduk usia 0-9 tahun dan meningkatnya proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas semakin memperjelas bahwa, adanya indikasi rendahnya angka kelahiran maupun angka kematian di kabupaten Kolaka.

Ketika kita berfokus pada kelompok usia produktif dan tidak produktif, ada pola yang menarik di tahun 2020. Secara proporsi, terlihat kecenderungan yang meningkat pada penduduk kelompok usia produktif. Pada tahun 2019 sekitar 67,27 persen penduduk merupakan usia produktif (15-64 tahun). Dan pada tahun 2020 proporsinya menjadi 67,44 persen. Peningkatan 0,17 persen ini, jika dikonversikan menjadi

jumlah penduduk (proyeksi) di Kolaka, mencapai lebih dari 3.800 jiwa. Peningkatan ini bisa terjadi sebagai akibat dari faktor alamiah yaitu jumlah penduduk dengan usia 40-64 tahun yang mengalami peningkatan.

Gambar 2.3. Perkembangan Proporsi Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif (Persen), 2018-2020



Sumber: Data Penduduk Hasil Proyeksi SUPAS 2015

2.2 Angka Beban Ketergantungan

Meninjau lebih jauh mengenai kondisi kependudukan di Kabupaten Kolaka, dapat diperoleh analisis mengenai angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) yang merupakan salah satu indikator demografi yang cukup penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam membiayai konsumsi makanan dan bukan makanan penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi.

Pada tahun 2020, proporsi penduduk belum produktif dan tidak produktif lagi terhadap keseluruhan penduduk sekitar 32,56 persen dan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 67,44 persen. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kelompok usia produktif masih mendominasi.

Tabel 2.2. Persentase Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif serta Angka Beban Ketergantungan, 2018-2020

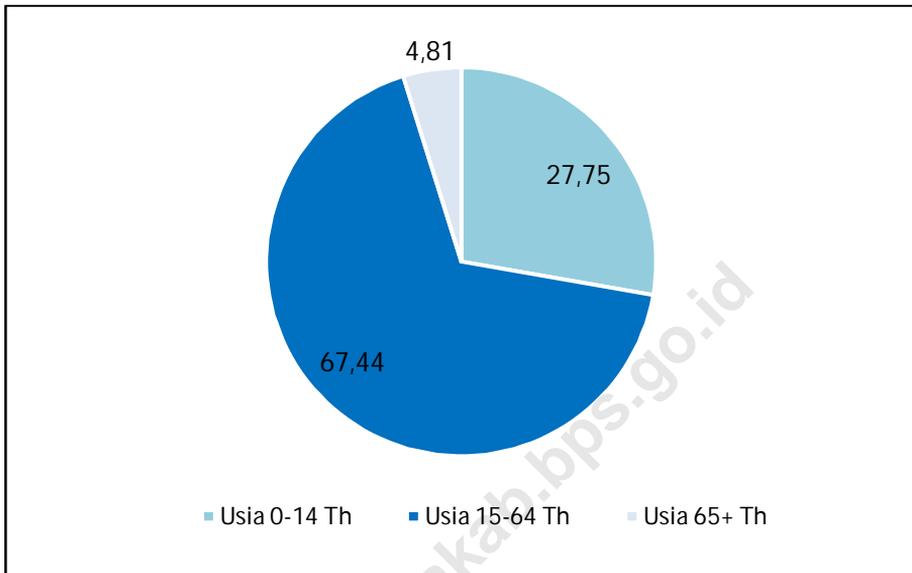
Jumlah Penduduk	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Usia Produktif	67,08	67,27	67,44
Usia Tidak Produktif	32,92	32,73	32,56
Angka Beban Ketergantungan	49,07	48,65	48,28

Sumber: Data Penduduk Hasil Proyeksi SUPAS 2015

Angka beban ketergantungan menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir. Rasio Ketergantungan pada tahun 2020 sebesar 48,28 persen, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung biaya konsumsi (makanan dan bukan makanan) sekitar 48 sampai 49 orang penduduk usia tidak produktif. Semakin kecil rasio ketergantungan di suatu wilayah, maka akan memperbesar peluang wilayah tersebut memperoleh keuntungan demografi yang dikenal dengan istilah 'bonus demografi'. Bonus demografi dapat didefinisikan sebagai kondisi menguntungkan bagi pembangunan daerah karena tingginya jumlah penduduk usia produktif yang menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif.

Penduduk kelompok usia produktif merupakan aset yang sangat berharga karena diharapkan dapat menopang ekonomi dalam keluarga atau secara gamblang mereka diharapkan dapat menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, dalam skala yang lebih luas, dominasi keberadaan penduduk usia produktif diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tempat tinggalnya.

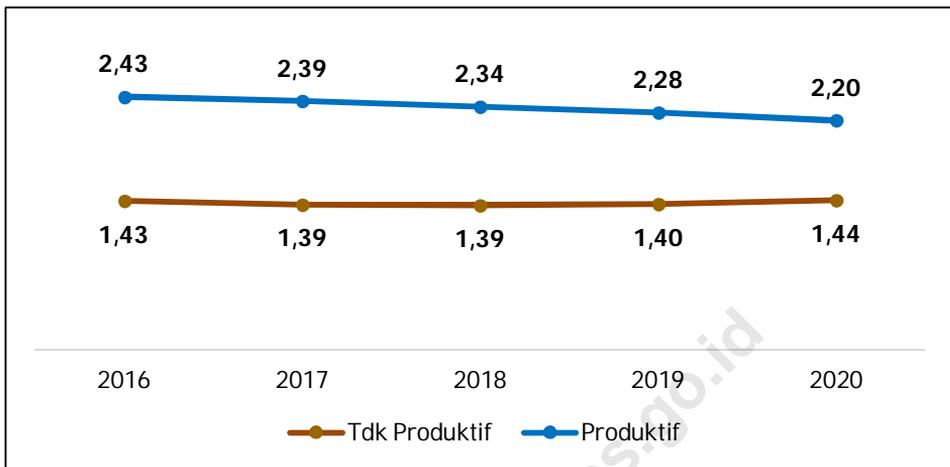
Gambar 2.4. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktivitas (Persen),2020



Sumber: Data Penduduk Hasil Proyeksi SUPAS 2015

Dampak keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti tercermin pada gambar di atas. Sebesar 67,44 persen penduduk di Kabupaten Kolaka berada pada kelompok usia produktif (15-64 Tahun). Selanjutnya 27,75 persen berada pada kelompok usia belum produktif (0-14 Tahun) dan 4,81 persen berada pada kelompok usia tidak produktif lagi (65 Tahun keatas). Lebih besarnya persentase penduduk usia produktif diharapkan dapat mengurangi beban ketergantungan, yang berarti semakin kecil beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam pemenuhan kebutuhan keseharian keluarganya, baik itu kebutuhan makanan maupun kebutuhan bukan makanan. Dengan demikian akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi mereka untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Gambar 2.5. Laju Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif dan Usia Belum/Tidak Produktif Lagi(Persen), 2016 - 2020

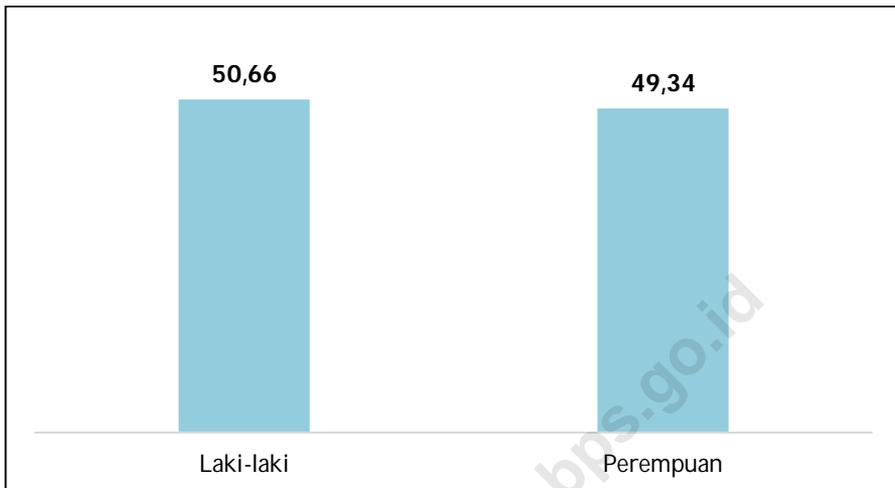


Sumber: Data Penduduk Hasil Proyeksi SUPAS 2015

Berdasarkan gambar 2.5, dapat diamati bahwa pertumbuhan penduduk usia belum/tidak produktif lagi (grafik bawah) masih lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk usia produktif (grafik atas). Dengan demikian, walaupun penduduk usia belum/tidak produktif lagi terus meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut masih lebih kecil daripada peningkatan penduduk usia produktif. Kondisi demikian menjelaskan mengapa rasio ketergantungan terus menurun walaupun secara absolut penduduk usia belum/tidak produktif lagi terus meningkat dari tahun ketahun.

Rasio ketergantungan yang cenderung menurun tersebut diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada saat itu terjadi bonus demografi, dimana terbuka peluang yang besar untuk melakukan investasi SDM guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Bonus demografi apabila dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan produksi dan seterusnya meningkatkan nilai tambah perekonomian suatu wilayah. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, bonus demografi dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik di masyarakat. Ketersediaan lapangan kerja yang layak dan memadai, sarana pengembangan kompetensi diri untuk meningkatkan kualitas SDM supaya mampu menghadapi persaingan global, diperlukan untuk mengimbangi bonus demografi yang akan segera kita hadapi dalam beberapa waktu kedepan.

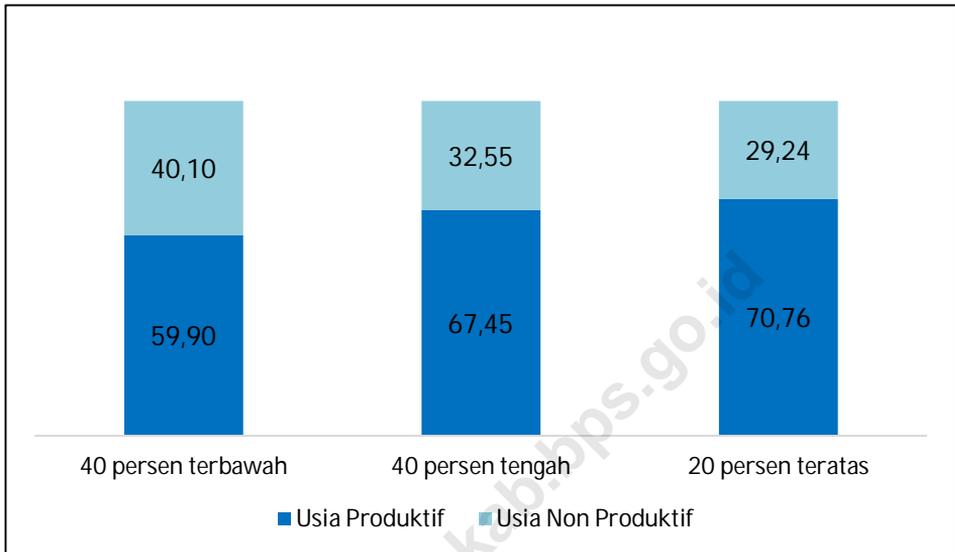
Gambar 2.6. Persentase Penduduk Usia Produktif Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020



Sumber: Data Penduduk Hasil Proyeksi SUPAS 2015

Meninjau lebih jauh mengenai komposisi penduduk usia produktif menurut jenis kelamin, terlihat pada gambar 2.6 bahwa persentase penduduk laki-laki yang berada pada kelompok usia produktif sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Adapun besarnya yaitu, penduduk laki-laki yang berada pada kelompok usia produktif tahun 2020 sebesar 50,66 persen dan penduduk perempuan yang berada pada kelompok usia produktif tahun 2020 sebesar 49,34 persen.

Gambar 2.7. Persentase Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020

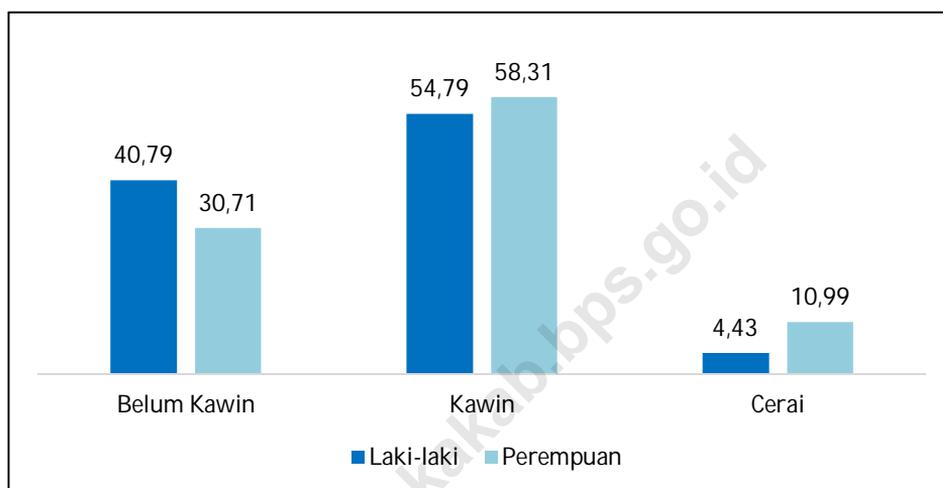


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Ketika dikelompokkan antara penduduk usia produktif dengan penduduk tidak produktif, proporsi penduduk usia produktif masih selalu lebih besar dibandingkan yang tidak produktif. Baik itu saat ditinjau menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), maupun ketikaditinjau menurut kelompok pengeluaran. Proporsi penduduk usia produktif selalu melebihi setengahnya (di atas 50 persen). Dominasi penduduk usia produktif di berbagai kelompok ini diharapkan mampu menopang dan mendorong percepatan pergerakan ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Mulai dari kelompok masyarakat berpengeluaran rendah hingga kelompok masyarakat berpengeluaran tinggi.

2.3 Status Perkawinan

Gambar 2.8. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan (Persen), 2020



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Komposisi penduduk menurut status perkawinan menunjukkan bahwa persentase penduduk yang berstatus belum kawin pada kelompok laki-laki usia 10 tahun ke atas lebih besar dibanding perempuan pada kelompok usia yang sama, yakni 40,79 persen berbanding 30,71 persen. Sementara itu penduduk yang berstatus kawin pada kelompok perempuan usia 10 tahun ke atas sebesar 58,31 persen, lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu 54,79 persen.

Begitu pula penduduk yang berstatus cerai, persentase pada kelompok perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, baik yang cerai hidup maupun cerai mati. Sebesar 10,99 persen perempuan kelompok usia 10 tahun ke atas berstatus janda (status perkawinannya cerai mati atau cerai hidup). Sedangkan laki-laki yang berstatus duda (status perkawinannya cerai mati atau cerai hidup) sejumlah 4,43 persen pada kelompok usia yang sama.

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan (Persen), 2018-2020

Status Perkawinan	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	35,25	35,31	35,89
Kawin	57,23	57,60	56,50
Cerai Hidup dan cerai mati	7,52	7,09	7,61

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018-2020

Secara total (laki-laki dan perempuan) persentase penduduk yang berstatus cerai (cerai hidup atau cerai mati) cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018 persentase jumlah penduduk yang berstatus cerai sebanyak 7,52 persen dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 7,61 persen. Fenomena yang perlu menyita perhatian bersama, apakah peningkatan jumlah penduduk berstatus cerai ini disebabkan oleh faktor alamiah (akibat pasangan meninggal dunia/ cerai mati), ataukah perceraian yang dipicu oleh adanya konflik dalam rumah tangga.

Data yang tersaji menjadi lebih informatif ketika mengintegrasikan antara karakteristik status perkawinan dengan tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat. Dalam bahasan ini, pengeluaran konsumsi (makanan dan nonmakanan) merupakan pendekatan untuk memperoleh gambaran pendapatan masyarakat.

Ketika masyarakat usia 10 tahun ke atas dikelompokkan berdasarkan pendapatannya, terlihat pola yang mencolok pada masyarakat berstatus cerai (tabel 2.4). Persentase tertinggi ada pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran teratas yaitu mencapai 10,22 persen. Dari data tersebut ada indikasi bahwa kecukupan materi tidak seiring sejalan dengan harmonisasi dalam keluarga.

Tabel 2.4. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Status Perkawinan (Persen), 2020

Karakteristik	Belum kawin	Kawin	Cerai	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelompok pengeluaran				
40 persen terbawah	39,36	53,31	7,33	100
40 persen tengah	35,44	58,02	6,54	100
20 persen teratas	30,37	59,41	10,22	100
Pendidikan Tertinggi				
SD ke bawah	40,58	47,89	11,53	100
SMP ke atas	32,32	63,06	4,63	100

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

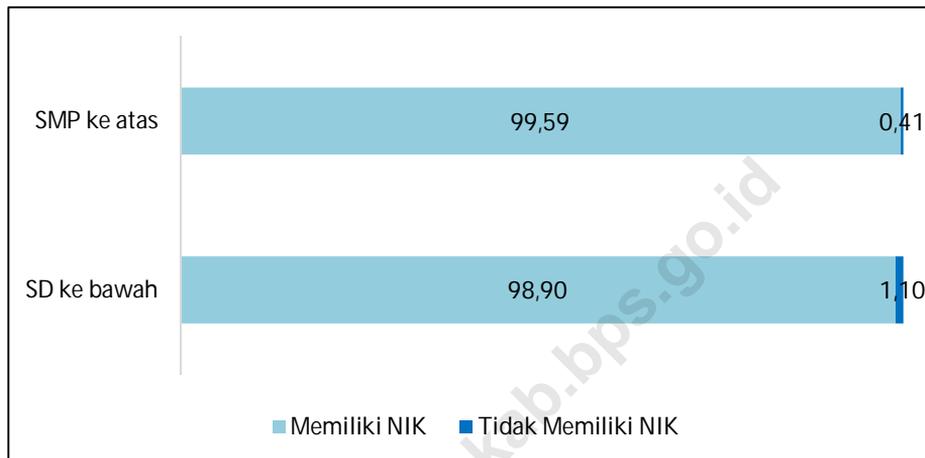
Mengamati keterkaitan antara karakteristik status perkawinan dengan pendidikan terakhir yang ditamatkan masyarakat. Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 2.4 di atas, masyarakat usia 10 tahun ke atas yang pendidikan tertingginya SD atau di bawahnya yang berstatus kawin ada sebanyak 47,89 persen. Sedangkan pada kelompok masyarakat dengan pendidikan tertinggi SMP ke atas, yang berstatus kawin lebih tinggi yaitu 63,06 persen. Namun, jika diamati lebih lanjut untuk kasus cerai hidup maupun cerai mati, persentasenya lebih tinggi pada kelompok masyarakat dengan pendidikan tertingginya SD ke bawah yaitu 11,53 persen. Sedangkan pada kelompok masyarakat dengan pendidikan tertinggi SMP ke atas sebesar 4,63 persen.

2.4 Kepemilikan Kartu Identitas

Lebih lanjut bahasan mengenai kepedulian masyarakat terhadap kelengkapan administrasi kewarganegaraannya, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data mengenai kepemilikan ini akan ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga (KRT) dan kelompok pengeluaran masyarakat. Diasumsikan bahwa, kepedulian mengenai kelengkapan berkas administrasi seluruh Anggota Rumah Tangga (ART) memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat pendidikan KRT. Hasil survei 2020 memperkuat dan membuktikan asumsi tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan KRT,

kepemilikan akta kelahiran ART cenderung lebih tinggi pula, meskipun perbedaannya tidak begitu signifikan.

Gambar 2.9. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Keatas yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Pendidikan Tertinggi KRT (Persen), 2020



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Dari gambar 2.9 terlihat bahwa, kepemilikan NIK oleh ART dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga SD ke bawah sebanyak 98,90 persen. Angka ini terus meningkat seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan KRT. Penduduk dengan KRT yang memiliki pendidikan tertinggi SMP ke atas, sekitar 99,59 persen diantaranya sudah memiliki NIK.

Tabel 2.5. Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Menurut Kelompok Umur dan Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020

Kelompok Pengeluaran	Kelompok Umur	
	5 tahun ke atas	17 tahun ke atas
(1)	(2)	(3)
40 persen terbawah	99,14	98,78
40 persen tengah	99,27	99,04
20 persen teratas	99,66	99,58

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase kepemilikan NIK pada kelompok umur 17 tahun ke atas masih menunjukkan pola yang sama seperti pada klasifikasi menurut tingkat pendidikan KRT. Masyarakat yang masih belum memiliki NIK banyak terdapat di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Yang dalam hal ini didekati dengan besaran pengeluaran masyarakat.

<https://kolakakab.bps.go.id>

PENDIDIKAN

Harapan Lama Sekolah 2019

12,80 Tahun



Rata-rata Lama Sekolah 2019

8,76 Tahun



Konsep dan Definisi

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)** adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).
- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.
- **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.
- **Tamat sekolah** adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.
- **Tidak bersekolah lagi** adalah anggota rumah tangga berumur lima tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di jenjang pendidikan formal maupun nonformal (paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup, sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban "mencerdaskan kehidupan bangsa". Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, dan ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Mengacu pada pembahasan di atas, hal-hal yang menyangkut dunia pendidikan akan dibahas dalam bab ini. Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan Ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Pada tahun 2019, terjadi kenaikan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kolaka bila dibandingkan dengan tahun 2018. HLS naik dari 12,39 tahun menjadi 12,80 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA. Kenaikan HLS ini menunjukkan perbaikan kondisi pendidikan di wilayah ini.

Ukuran lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

RLS di Kolaka pada tahun 2019 tercatat sebesar 8,76 tahun. Ini berarti hingga tahun 2019, secara rata-rata penduduk Kolaka usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,76 tahun atau hampir menamatkan kelas IX. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 8,57 tahun. Meski naik, dari angka tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Kolaka yang berusia 25 tahun ke atas putus sekolah di SMP.

Sesungguhnya, angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu karena ini merupakan *outcome* dari proses pendidikan. Karena RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas, artinya penduduk yang saat ini diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka HLS saat ini dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan.

Tabel 3.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kolaka (Tahun), 2018 - 2019

Indikator	Tahun	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,39	12,80
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,57	8,76

Sumber: Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019

3.2 Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi akan mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi. Semakin meningkatnya keterampilan/keahlian yang dimiliki maka akan semakin mudah mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Tabel 3.2. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin (Persen), 2018 - 2019

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Tidak Mempunyai Ijazah	13,77	16,04
SD/MI	26,11	25,17
SMP/MTS	19,89	20,39
SMA/SMK/MA keatas	40,23	38,40
SMP +	60,12	58,79

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum penduduk laki-laki pada tahun 2019 yang menempuh pendidikan SMP ke atas lebih banyak daripada penduduk perempuan. Tamatan jenjang pendidikan SD/MI penduduk laki-laki sebesar 26,11 persen dan perempuan sebesar 25,17 persen. Akan tetapi, persentase penduduk perempuan yang mampu menamatkan pendidikan hingga tingkat SMP/MTS lebih tinggi daripada laki-laki. Pada jenjang pendidikan SMP/MTS, penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan sebesar 20,39 persen dan laki-laki sebesar 19,89 persen. Selanjutnya penduduk perempuan yang

berhasil menamatkan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/MA keatas sebesar 38,40 persen. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang berhasil menamatkan pendidikan pada jenjang yang sama, yaitu sebesar 40,23 persen. Selanjutnya jika dilihat persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah, penduduk perempuan memiliki persentase yang lebih besar daripada penduduk laki-laki.

3.3 Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS adalah rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. APS berfungsi untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS berarti semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun meningkatnya APS bukan berarti meningkat juga pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. APM merupakan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin, 2018 - 2019

Indikator Pendidikan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+ Perempuan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
APS						
- 7-12 tahun	99,62	99,14	99,87	100	99,74	99,58
- 13-15 tahun	95,07	93,77	97,03	98,31	96,02	95,70
- 16-18 tahun	68,49	71,04	74,51	71,07	71,46	71,05
APM						
- SD/MI	99,62	99,14	99,87	100	99,74	99,58
- SMP/MTS	68,38	74,25	79,04	68,78	73,56	71,91
- SMA/SMK/MA	66,12	58,22	55,24	62,76	60,75	60,56

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019

Pada tahun 2019, penduduk usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah baik laki-laki ataupun perempuan adalah sebesar 0,42 persen. Selanjutnya pada kelompok usia 13-15 tahun, penduduk yang belum mengenyam pendidikan, yaitu sebesar 4,30 persen. Kemudian pada kelompok usia 16-18 tahun, masih terdapat 28,95 persen penduduk yang belum mengenyam pendidikan. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah penduduk perempuan lebih tinggi daripada penduduk laki-laki pada semua kelompok umur. Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan penurunan untuk semua kelompok umur dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, penurunan APM terjadi pada semua jenjang pendidikan, namun yang paling besar penurunannya ada pada jenjang pendidikan SMP/MTS yaitu sebesar 1,65 persen. APM menunjukkan partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menyekolahkan anak-anak mereka dengan waktu.

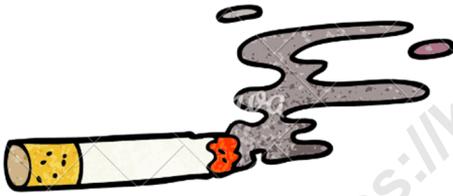
Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM pada tingkat pendidikan SD/MI untuk laki-laki lebih rendah dibanding perempuan. APM SD untuk perempuan tercatat sebesar 100 persen pada tahun 2018 sedangkan APM SD untuk laki-laki sebesar 99,14 persen. Pada tingkat

pendidikan SMP/MTS, APM penduduk laki-laki lebih tinggi daripada penduduk perempuan. APM SMP/MTS laki-laki sebesar 74,25 persen dan APM SMP/MTS perempuan sebesar 68,78 persen pada tahun 2018. Sedangkan APM pada tingkat SMA/ sederajat untuk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat, APM perempuan tercatat sebesar 62,76 persen dan 58,22 persen untuk laki-laki.

<https://kolakakab.bps.go.id>

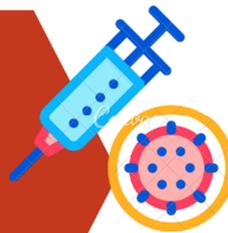
KESEHATAN

Angka Kesakitan
13,96 Persen



Perokok Aktif
29,22 Persen

Imunisasi Lengkap
52,89 Persen



Konsep dan Definisi

- **Angka kesakitan** adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
- **Berobat jalan** adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah pasien.
- **Baduta** adalah Anggota Rumah Tangga (ART) yang berusia di bawah 2 tahun yaitu rentang 0-23 bulan.
- **Fasilitas kesehatan** meliputi RS Pemerintah, RS Swasta, Puskesmas, Pustu, Polindes, dan Tempat praktik tenaga kesehatan.
- **Jaminan kesehatan** adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
- **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.

Penduduk mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, perhatian terhadap penduduk tidak hanya menyangkut kuantitasnya, tetapi juga kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satunya dilakukan melalui peningkatan taraf kesehatan. Faktor kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan merupakan salah satu komponen yang diperhatikan dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan yang semakin baik akan meningkatkan kualitas manusia yang baik sehingga meningkatkan produktivitasnya.

Salah satu aspek penting kesejahteraan masyarakat adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Derajat kesehatan penduduk dapat diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*). Angka kesakitan/morbiditas menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit. Yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, usaha peningkatan dan pemeliharaan mutu pelayanan kesehatan perlu mendapat perhatian. Misalnya melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan peningkatan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik. Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tercapai atau tidaknya pembangunan di suatu daerah karena hal tersebut merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik secara fisik maupun mental. Daerah yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan

pembangunan. Semakin tinggi derajat kesehatan dapat diartikan semakin baik kualitas sumber daya manusia, terlebih bila dihubungkan dengan kesehatan ibu dan anak.

Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai kebijakan dan program, antara lain melalui sosialisasi bidang kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan/asuransi kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui BPJS. Semua lapisan masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, murah dan merata sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin baik.

4.1 Status Kesehatan Masyarakat

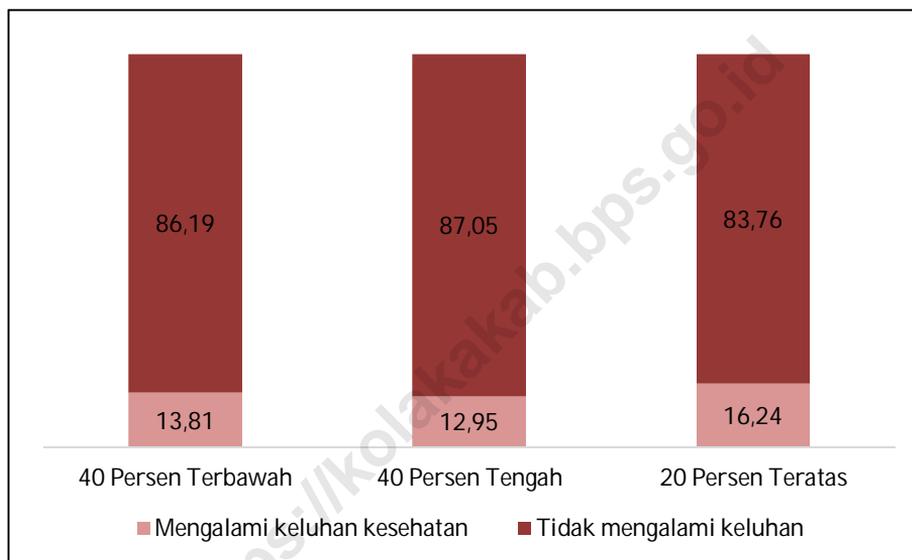
Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh perilaku dan pola konsumsi masyarakat terutama dalam upaya preventif dari berbagai keluhan kesehatan. Perilaku dan pola konsumsi ini berkaitan dengan cara serta kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menyebabkan terjadi pergeseran pola konsumsi yang secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Salah satu indikator derajat kesehatan yaitu keluhan kesehatan yang dialami masyarakat. Termasuk dalam kategori memiliki keluhan kesehatan, ketika seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena gangguan/penyakit yang sering dialami penduduk seperti panas, pilek, diare, pusing, sakit kepala, maupun karena penyakit akut dan kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminalitas, atau keluhan lainnya.

Pada tahun 2020, angka kesakitan masyarakat sebesar 13,96 persen. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk, 13 hingga 14 orang diantaranya mengalami keluhan kesehatan seperti panas, pilek, diare, sakit kepala, maupun penyakit kronis atau keluhan lainnya hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebesar 13,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kesehatan penduduk sedikit menurun dari tahun sebelumnya.

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan cenderung lebih banyak yang mengalami keluhan kesehatan yaitu sebesar

14,87 persen dari keseluruhan penduduk perempuan. Sedangkan penduduk laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan adalah sebesar 13,10 persen dari keseluruhan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki relatif lebih sehat dibanding penduduk perempuan.

Gambar 4.1. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Jika ditinjau berdasarkan kelompok pengeluaran, persentase penduduk 20 persen berpengeluaran teratas yang mengalami keluhan kesehatan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan kelompok berpengeluaran menengah atau bawah. Fenomena demikian memberikan indikasi adanya pengaruh gaya hidup terhadap status kesehatan masyarakat.

4.2 Akses Pelayanan Kesehatan

Beberapa faktor yang biasanya menjadi pertimbangan masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan adalah jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, serta kondisi sosial ekonomi penduduk. Yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya berikut dengan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Pembangunan di bidang kesehatan oleh pemerintah mencakup peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar. Tujuannya adalah agar tersedianya fasilitas yang mudah dan murah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudahan yang sudah difasilitasi pemerintah salah satunya yaitu jaminan kesehatan. Berikut data mengenai pemanfaatan jaminan kesehatan oleh masyarakat pada tahun 2020.

Gambar 4.2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan (Persen), 2020



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Diantara masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan dan pernah berobat jalan, hanya 36 dari setiap 100 penduduk yang memanfaatkan kartu jaminan kesehatan dalam mengakses fasilitas kesehatan untuk mengatasi keluhan kesehatan yang dialaminya. Lebih dari setengah masyarakat yang berobat jalan tidak menggunakan jaminan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Ditinjau dari pemanfaatan kartu jaminan kesehatan oleh masyarakat berdasarkan kelompok pendapatannya, terlihat fenomena yang masih belum sesuai dengan harapan. Diantara masyarakat dengan kelompok pendapatan 40 persen terendah yang pernah berobat jalan, hanya 40,47 persen diantara mereka yang menggunakan layanan jaminan kesehatan. Dengan kata lain, 59,53 persen masyarakat lainnya hanya memperoleh layanan kesehatan dengan menyesuaikan kemampuan ekonomi mereka yang tergolong rendah tersebut. Lihat tabel 4.1.

Tabel 4.1. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020

Kelompok Pengeluaran	Menggunakan Jaminan Kesehatan	Tidak Menggunakan Jaminan Kesehatan
(1)	(2)	(3)
40 Persen Terbawah	40,47	59,53
40 Persen Tengah	38,21	61,79
20 Persen Teratas	21,25	78,75

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran masyarakat, semakin rendah persentase masyarakat yang memanfaatkan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Pemanfaatan kartu jaminan kesehatan oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah dan tinggi masing-masing yaitu 38,21 persen dan 21,25 persen. Sementara pada kelompok pengeluaran bawah, 40,47 persen sudah menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan.

Selain membutuhkan kartu jaminan kesehatan, ada sisi lain yang juga diperlukan masyarakat, yaitu kemudahan akses pemanfaatan jaminan kesehatan yang sudah mereka terima dalam wujud kartu. Ketersediaan dan tersampainya informasi untuk masyarakat mengenai kemudahan penggunaan layanan kesehatan melalui kartu jaminan kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah masih memerlukan perhatian khusus. Hal ini menjadi penting agar segala bentuk bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah tidak hanya tepat sasaran, namun juga tepat guna oleh masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya.

4.3 Kesehatan Ibu dan Anak

Ibu yang sedang hamil harus mulai memperhatikan asupan gizi dan juga melakukan imunisasi. Setelah anak lahir sangat dianjurkan untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. ASI adalah nutrisi terbaik dan terlengkap, mengandung protein dan zat-zat gizi berkualitas tinggi serta mengandung zat antibodi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi serta melindungi tubuh bayi dari alergi dan penyakit infeksi lainnya. Oleh sebab itu pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan setelahnya, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan/minuman lain. Selanjutnya setelah bayi berusia 6 bulan keatas dilanjutkan bersama dengan makanan tambahan dan ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun.

Persentase anak baduta yang pernah diberi ASI sebesar 95,25 persen. Artinya, masih ada 5 dari setiap 100 baduta yang sama sekali tidak pernah mendapatkan ASI. Tidak terlihat adanya perbedaan perlakuan antara bayi laki-laki dan perempuan. Dari 95,25 persen anak yang pernah diberi ASI tersebut, rata-rata lamanya pemberian ASI adalah 9 bulan. Secara umum pemberian ASI telah dilakukan oleh para ibu, namun demikian upaya dukungan pemberian ASI selama 2 tahun tetap harus dilakukan karena berdasarkan survei yang dilakukan, baduta yang menerima ASI secara penuh hingga dua tahun masih relatif sedikit.

Tabel 4.2. Persentase Baduta yang Pernah Diberi Air Susu Ibu (ASI) Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020

Kelompok Pengeluaran	Pernah diberi ASI	Tidak pernah diberi ASI
(1)	(2)	(3)
40 Persen Terbawah	96,94	3,06
40 Persen Tengah	91,33	8,67
20 Persen Teratas	100	0

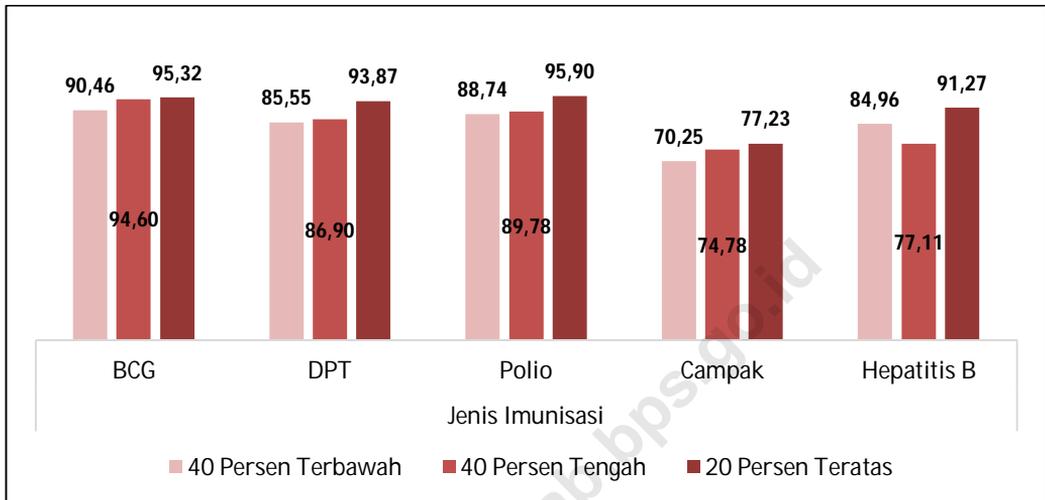
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Tabel 4.2 menjelaskan perilaku pemberian ASI kepada anak baduta yang dikelompokkan menurut tingkatan ekonomi masyarakat. Fakta menonjol yang terlihat dari tabel tersebut adalah pada kelompok masyarakat ekonomi teratas. Dari setiap 100 baduta di kelompok tersebut, semua anak sudah pernah mendapatkan ASI.

Buku Kesehatan Anak/Kartu Menuju Sehat merupakan alat untuk mendeteksi secara dini terhadap adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak, sebagai alat komunikasi dan penyuluhan dengan informasi yang penting bagi ibu dan keluarga serta masyarakat mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk rujukannya dan paket (standar) pelayanan gizi, imunisasi dan tumbuh kembang balita. Penerapan buku KIA secara benar akan berdampak pada peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga akan kesehatan ibu dan anak, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta meningkatkan sistem monitoring, dan informasi kesehatan.

Selain ASI, imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan daya tahan tubuh balita agar sistem pertahanan tubuhnya kuat terhadap berbagai penyakit. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap diharapkan akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan mencegah penularan kepada orang disekitarnya. Sesuai dengan pedoman WHO, anak dinyatakan telah diimunisasi lengkap apabila telah mendapatkan satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT, tiga kali imunisasi polio, dan satu kali imunisasi campak. Pemberian imunisasi pada balita seharusnya diberikan secara lengkap dan tepat waktu sebelum bayi berumur satu tahun.

Gambar 4.3. Persentase Balita (umur 0-59 bulan) yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi dan Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Gambar 4.3 di atas menunjukkan penerimaan imunisasi oleh balita yang dikelompokkan menurut status ekonomi masyarakat. Pola yang sama terlihat untuk semua jenis imunisasi yang seharusnya diterima oleh balita. Kelengkapan imunisasi semakin baik diterima oleh masyarakat kelompok ekonomi teratas. Sedangkan pada kelompok ekonomi bawah, balita yang mendapatkan imunisasi hanya sejumlah 70 sampai 90 persen saja. Artinya ada sekitar 10 sampai 30 orang dari setiap 100 balita di kelompok masyarakat ekonomi bawah yang tidak mendapatkan salah satu atau lebih imunisasi sebagaimana yang disarankan oleh organisasi kesehatan internasional (WHO), yaitu imunisasi BCG, DPT, polio, campak/morbili, dan hepatitis B.

Pemerintah telah mencanangkan program pemberian imunisasi dasar lengkap secara gratis untuk balita. Usia balita merupakan usia paling rentan terhadap berbagai virus dan penyakit. Namun, pada kenyataannya masih 52,89 persen saja balita yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Meskipun untuk kepemilikan kartu kontrol imunisasi (KIA/KMS) sudah mencapai lebih dari 80 persen.

4.4 Perilaku Merokok

Berbagai masalah kesehatan bisa terjadi pada tubuh seorang perokok. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Tak hanya berbahaya bagi si perokok itu sendiri, asap rokoknya pun meningkatkan risiko penyakit bagi perokok pasif atau mereka yang sering terpapar asap rokok.

Gambar 4.4. Perilaku Merokok Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Persen), 2020



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Pada tahun 2020 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merokok sebanyak 29,22 persen (gambar 4.4). Artinya, dari setiap 100 orang yang berusia di atas 15 tahun, dengan tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, 29 sampai 30 orang diantaranya adalah perokok aktif. Secara sederhananya dapat dikatakan bahwa, hampir sepertiga dari penduduk adalah perokok aktif dengan rata-rata batang rokok yang dihisap sebanyak 113 batang setiap minggunya atau 16 batang setiap harinya. Meskipun peringatan bahaya merokok sudah tertera di setiap bungkus rokok, perilaku merokok masih cukup kental di tengah masyarakat karena setidaknya para perokok menghabiskan satu bungkus rokok dalam sehari.

Tabel 4.3. Perilaku Merokok Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020

Kelompok Pengeluaran	Merokok	Tidak Merokok
(1)	(2)	(3)
40 Persen Terbawah	29,79	70,21
40 Persen Tengah	29,91	70,09
20 Persen Teratas	26,95	73,05

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Dari tabel 4.3 terlihat perilaku merokok masyarakat yang dikelompokkan menurut tingkat ekonominya. Persentase perokok terbanyak adalah kelompok masyarakat ekonomi menengah, yaitu mencapai 29,91 persen. Sejalan dengan data-data sebelumnya yang menunjukkan pola, semakin tinggi kemampuan ekonomi sebuah keluarga, semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang dilaluinya. Dengan demikian, sesuai dengan harapan bahwa semakin baik pula pemahaman mereka terhadap bahaya merokok bagi kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Pada kelompok masyarakat ekonomi bawah, persentase perokok tidak sebanyak kelompok masyarakat ekonomi menengah. Pada kelompok ini, setidaknya 29 dari setiap 100 orang diantara mereka adalah perokok aktif. Tekanan ekonomi diperkirakan turut menekan jumlah perokok. Jika melihat data rata-rata batang rokok yang dihisap per minggu sebanyak 113 batang atau sekitar 16 batang per hari. Jumlah ini setara dengan satu bungkus rokok per harinya. Kemudian dikali dengan harga rokok sekitar Rp20.000,- per bungkus maka didapat biaya pengeluaran untuk membeli rokok per bulannya sekitar Rp600.000,-. Hal ini tentu akan memberatkan masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah. Walaupun demikian, perbedaan persentase perokok aktif pada masyarakat bawah dan menengah tidak terlalu signifikan.

Beberapa institusi sudah menerapkan area bebas asap rokok di lingkungannya. Namun, edukasi mengenai bahaya merokok perlu terus digalakkan, mengingat bahaya jangka panjang yang ditimbulkannya. Apalagi data yang disajikan tersebut adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dengan demikian, sangat dimungkinkan diantara para perokok

tersebut ada yang masih berada di usia sekolah atau bahkan masih bersekolah. Institusi pendidikan berperan cukup besar dalam memberikan pemahaman demikian kepada anak didiknya dan seluruh civitas akademika di lingkungan sekolah.

<https://kolakakab.bps.go.id>

PERUMAHAN

Rumah Milik Sendiri

89,39 Persen



Sumber Air Utama : Sumur Bor/Pompa

41,47 Persen



Memiliki Jamban Sendiri

88,31 Persen



Konsep dan Definisi

- **Sumber air minum** adalah sumber dari air yang digunakan untuk keperluan minum anggota rumah tangga.
- **Air Ledeng** adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- **Air sumur terlindung** adalah air sumur dengan lingkaran mulut sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit setinggi 0,8 meter di atas tanah, dan sedalam 3 meter di bawah tanah, dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh satu meter dari lingkaran mulut sumur.
- **Air sumur tak terlindung** adalah air sumur dengan lingkaran mulut sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok paling sedikit setinggi 0,8 meter di atas tanah, dan sedalam 3 meter di bawah tanah, dan di sekitar mulut sumur tidak ada lantai semen sejauh satu meter dari lingkaran mulut sumur.
- **Air minum bersih** adalah air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (*septic tank*) > 10 meter.
- **Air minum layak** adalah fasilitas air minum yang dilindungi dari kontaminasi luar khususnya kontaminasi dengan kotoran. Sumber air minum layak meliputi air ledeng, air pipa, sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (*septic tank*) > 10 meter, pengumpulan air hujan dan air minum kemasan.
- **Kloset leher angsa** adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat selain sandang dan pangan. Tak hanya untuk tempat berlindung, rumah juga berfungsi sebagai tempat tinggal. Oleh karena itu, aspek kesehatan dan kenyamanan bahkan estetika bagi sebagian masyarakat menjadi pertimbangan dalam pemilihan rumah untuk keluarganya. Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Kualitas lingkungan rumah tinggal memengaruhi status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Perumahan terkait erat dengan kesehatan. Struktur, lokasi, fasilitas, lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh yang kuat pada keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Kondisi dan penggunaan perumahan yang buruk dapat memberikan perlindungan yang lemah terhadap penyakit. Demikian sebaliknya, kondisi perumahan yang layak tidak hanya dapat melindungi orang terhadap bahaya kesehatan tetapi juga mendukung produktivitas ekonomi, kesejahteraan psikologis dan kekuatan sosial.

Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga berfungsi sebagai tempat untuk berinteraksi antar anggota rumah tangga dalam suasana yang nyaman dan sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung beberapa fasilitas perumahan yang tersedia, antara lain sarana penerangan yang cukup, air bersih untuk keperluan minum dan masak, serta tersedianya fasilitas jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Aksesibilitas anggota rumah tangga terhadap fasilitas perumahan tersebut akan menentukan kualitas rumah tangga yang bermuara pada tingkat kesejahteraan rumah tangga dan derajat kesehatan anggota rumah tangga yang tinggal didalamnya.

Unsur perumahan merupakan salah satu indikator kesejahteraan bagi pemilikinya. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian individu. Selain itu, kondisi rumah juga memengaruhi produktivitas dan kreativitas kerja seseorang. Rumah memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya

kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan papan maka diharapkan akan terwujud kesejahteraan rakyat yang semakin membaik.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 menyatakan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan yang dimaksud adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Beberapa fasilitas perumahan yang dijadikan sebagai indikator untuk mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah status kepemilikan rumah, sumber air minum dan sanitasi. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

5.1 Kepemilikan Rumah

Kondisi ekonomi suatu keluarga akan memberikan pengaruh terhadap status kepemilikan rumah. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan kondisi yang baik dan permanen. Berbeda halnya dengan keluarga yang berpenghasilan lebih rendah.

Lebih dari itu, status kepemilikan rumah akan berpengaruh pada kualitas rumah. Hal ini disebabkan karena adanya rasa memiliki akan membuat kecenderungan lebih besar untuk senantiasa memperbaiki kualitas rumahnya dibandingkan dengan rumah tangga yang tinggal di rumah dengan status bukan milik sendiri.

Pada tahun 2020, total rumah tangga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri sebesar 89,39 persen. Sedangkan 10,61 persen rumah tangga lainnya tinggal di rumah dengan status kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, dan lainnya. Mengamati lebih lanjut melalui tabel 5.1, dengan klasifikasi jenis kelamin KRT terlihat bahwa ternyata persentase rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan lebih banyak yang menempati rumah dengan status milik sendiri, yaitu mencapai 94,02 persen. Sedangkan rumah tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki

yang menempati rumah dengan status milik sendiri sebanyak 88,74 persen. Banyak faktor yang dimungkinkan sebagai penyebabnya. Salah satunya, rumah tangga yang KRT-nya perempuan cenderung menetap di rumah orang tuanya (warisan). Membutuhkan kajian lebih lanjut untuk memastikan faktor-faktor yang memengaruhinya.

Tabel 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati dan Jenis Kelamin KRT (Persen), 2020

Jenis Kelamin KRT	Status Kepemilikan Bangunan	
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	88,74	11,26
Perempuan	94,02	5,98
KOLAKA	89,39	10,61

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Ketika diamati melalui karakteristik taraf ekonomi rumah tangga (tabel 5.2), terlihat pola terbalik dari masyarakat pada umumnya. Kepemilikan rumah sendiri lebih banyak pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan pada masyarakat dengan ekonomi teratas, hanya 86,30 persen yang menempati rumah berstatus milik sendiri, sisanya boleh jadi menempati rumah kontrakan/sewa atau bebas sewa atau rumah dinas dan lainnya. Umumnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kepemilikan rumah sendiri berasal dari warisan, dimana hal ini tidak dipengaruhi oleh karakteristik tertentu di rumah tangga.

Tabel 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati (Persen), 2020

Kelompok Pengeluaran	Status Kepemilikan Bangunan	
	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri
(1)	(2)	(3)
40 Persen Terbawah	92,68	7,32
40 Persen Tengah	88,69	11,31
20 Persen Teratas	86,30	13,70
KOLAKA	89,39	10,61

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

5.2 Sumber Air

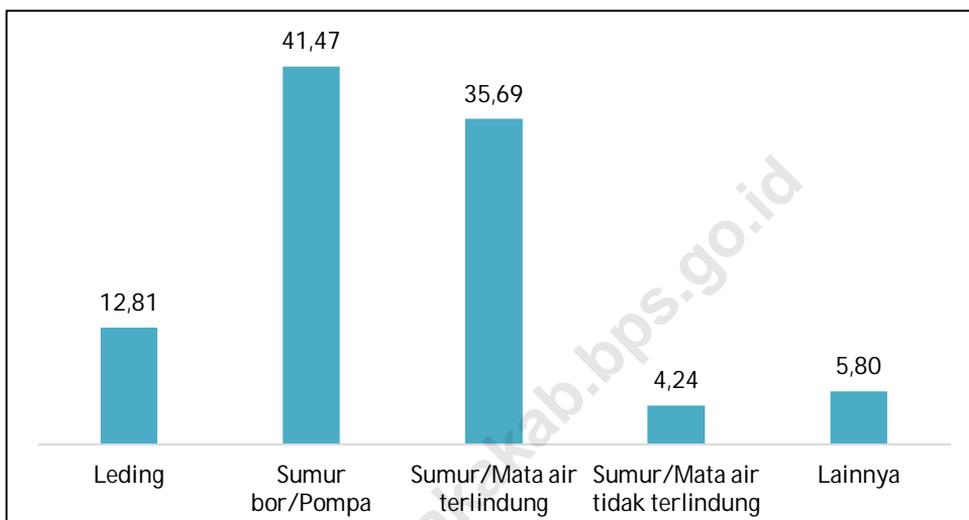
Organisasi Kesehatan Internasional (WHO), menyebutkan bahwa perumahan yang layak harus dapat memberikan perlindungan dari paparan penyakit menular. Salah satunya yaitu melalui pasokan sumber air yang bersih dan sehat.

Air merupakan salah satu kebutuhan vital dalam kelangsungan hidup manusia yang utamanya digunakan untuk minum, memasak, mandi, cuci, dll. Kualitas air yang digunakan berkaitan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat. Air yang bersih dan sehat adalah air yang terbebas dari kuman-kuman penyebab penyakit. Bila sumber airnya tercemar oleh kotoran, maka dikhawatirkan air yang dihasilkannya pun akan tercemar.

Ketersediaan air yang cukup untuk setiap rumah tangga menjadi sesuatu yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar. Sumber air yang digunakan sangat bervariasi bergantung pada ketersediaan akses serta kondisi sosial, ekonomi, dan letak geografis rumah tangga tersebut. Kelayakan air yang dikonsumsi rumah tangga juga perlu mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan tingkat kesehatan anggota rumah tangga. Keberadaan sumber air dengan jarak yang terlalu dekat dengan tempat penampungan tinja/limbah/kotoran membuka peluang tercemarnya air tersebut oleh sumber penyakit yang menyebar melalui perantara kotoran atau perantara air. Sumber air yang utamanya digunakan untuk minum dan memasak dapat dikatakan aman

dari kontaminasi jika berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan tinja/limbah/kotoran terdekat.

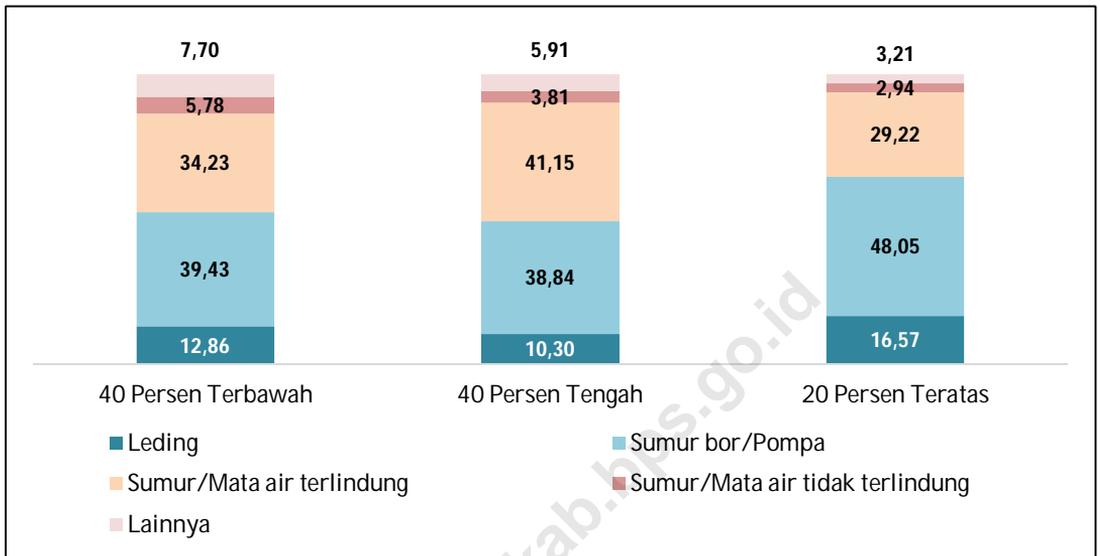
Gambar 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan untuk Mandi/Cuci/Lainnya (Persen), 2020



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Sumber air terbanyak yang digunakan oleh penduduk untuk mandi/cuci/lainnya adalah sumur bor/pompa, yaitu mencapai 41,47 persen. Selanjutnya, sumber air terbanyak kedua yaitu sumur/mata air terlindung sebanyak 35,69 persen, diikuti dengan air leding sebesar 12,81 persen. Menyusul sumber air lainnya seperti air hujan, dll sebesar 5,80 persen dan terakhir sumur/mata air tidak terlindung sebesar 4,24 persen.

Gambar 5.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Sumber Air Utama yang Digunakan Untuk Mandi/Cuci/Lainnya (Persen), 2020



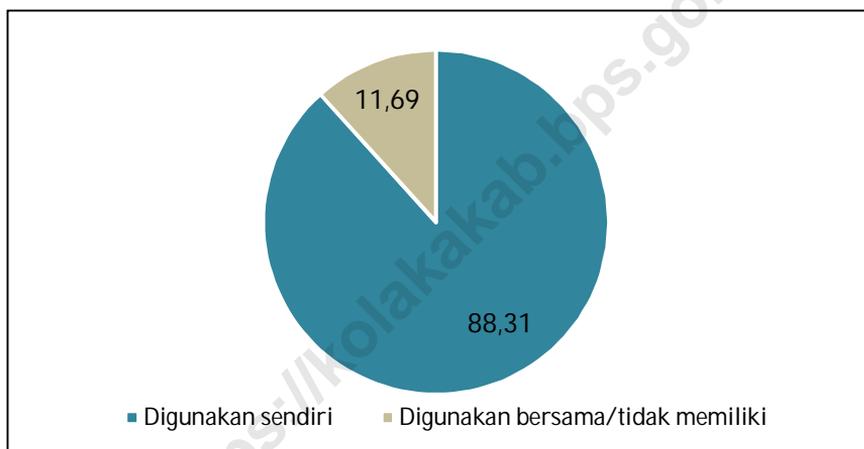
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Pada kelompok masyarakat ekonomi bawah, sumber air utama yang banyak digunakan untuk mandi/cuci/lainnya adalah sumur bor/pompa yaitu sebesar 39,43 persen. Sementara itu, pada kelompok ekonomi menengah, sumber air utama yang terbanyak digunakan adalah sumur/mata air terlindung yaitu sebesar 41,15 persen. Pada kelompok masyarakat ekonomi atas, penggunaan sumber air utama untuk keperluan mandi/cuci/lainnya yang terbanyak adalah sumur bor/pompa yaitu sebesar 48,05 persen. Dari gambar 5.2 dapat dilihat bahwa rumah tangga yang menggunakan air leding sebagai sumber air utama hanya sekitar 10-16 persen pada semua kelompok pengeluaran. Hal ini disebabkan distribusi air leding yang masih belum merata dan belum terlalu menjangkau wilayah pedesaan. Kualitas air leding yang didistribusikan juga belum maksimal sehingga banyak masyarakat yang beralih ke sumur bor/pompa dan sumur/mata air terlindung.

5.3 Sanitasi

Diantara infrastruktur dasar rumah tangga adalah air bersih, listrik, gas, dan pembuangan limbah rumah tangga atau sanitasi. Sebuah rumah tangga dikategorikan memiliki akses fasilitas sanitasi yang layak apabila rumah tangga tersebut minimal memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik.

Gambar 5.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Persen), 2020



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Selain itu juga akan menyebabkan berbagai penyakit seperti tipus, disentri, kolera, dan sebagainya. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Pada tahun 2020, sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan fasilitas buang air (jamban) sendiri, yaitu sebesar 88,31 persen. Secara umum, sudah banyak terlihat kemajuan berkaitan dengan fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh masyarakat. Meskipun persentase

rumah tangga yang menggunakan MCK dengan fasilitas digunakan bersama/umum atau tidak menggunakan jamban sudah menurun, angkanya masih cukup besar yaitu 11,69 persen. Hal ini berarti dalam setiap 100 rumah tangga, setidaknya 12 diantaranya masih menggunakan fasilitas MCK bersama/MCK umum atau bahkan belum memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian masyarakat dan pemerintah setempat, mengingat pentingnya kebersihan sanitasi untuk menciptakan masyarakat dengan lingkungan yang sehat dan terbebas dari penyakit.

Kepedulian masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas sanitasi di rumah tangganya, juga dipengaruhi oleh pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT. Ketika rumah tangga dikelompokkan menjadi dua berdasarkan pendidikan tertinggi KRT nya, maka diperoleh informasi sebagaimana tersaji dalam tabel 5.3 di bawah.

Terlihat pola yang menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan KRT, maka semakin besar pula kepedulian mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sanitasi. Pada kelompok rumah tangga dengan pendidikan tertinggi KRT SD atau di bawahnya sekitar 85,40 persen sudah memiliki fasilitas buang air besar sendiri, sedangkan 14,60 persen lainnya masih menggunakan fasilitas bersama/umum atau tidak menggunakan jamban. Kepemilikan fasilitas sanitasi ini membaik seiring meningkatnya pendidikan tertinggi KRT sebagaimana pada kelompok kedua yaitu, rumah tangga dengan KRT berpendidikan SMP ke atas. Pada setiap 100 rumah tangga, 90,60 persen diantaranya sudah memiliki fasilitas jamban yang digunakan sendiri oleh rumah tangga ybs.

Tabel 5.3. Persentase Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran dan Pendidikan Tertinggi KRT (Persen), 2020

Karakteristik	Kepemilikan Fasilitas Tempat BAB	
	Sendiri	Lainnya*
(1)	(2)	(3)
Kelompok Pengeluaran		
40 Persen Terbawah	80,20	19,80
40 Persen Tengah	88,12	11,88
20 Persen Teratas	98,84	1,16
Pendidikan Tertinggi KRT		
SD ke bawah	85,40	14,60
SMP ke atas	90,60	9,40

*Lainnya termasuk fasilitas bersama, MCK Umum, dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas BAB

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Ketersediaan fasilitas sanitasi ini tentu juga dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi rumah tangga. Semakin baik kemampuan ekonomi suatu rumah tangga, semakin baik pula kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur dasar rumah tangga tersebut. Pada kelompok rumah tangga ekonomi bawah, masih ada 19,80 persen rumah tangga yang belum memiliki fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri.

Pada kelompok rumah tangga ekonomi menengah, dari setiap 100 rumah tangga 12 diantaranya belum memiliki fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri. Demikian pada kelompok rumah tangga ekonomi teratas, sekitar 1 hingga 2 rumah tangga masih belum memiliki fasilitas buang air besar yang digunakan sendiri.

KONSUMSI DAN PENGELUARAN

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan

Makanan

Rp 590.624,-

Nonmakanan

Rp 544.630,-

Konsumsi Kalori
2.351,79 Kkal



Konsumsi Protein
70,05 Gram



Konsep dan Definisi

- **Konsumsi/pengeluaran rumah tangga** adalah jumlah uang yang digunakan untuk keperluan rumah tangga (makanan dan nonmakanan) yang benar-benar dikonsumsi (dimakan/dipakai) atau dibayarkan tanpa memperhatikan asal barang baik dari pembelian/produksi maupun pemberian/pembagian.
- **Konsumsi kalori dan protein** dihitung dengan mengalikan kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan nilai kandungan kalori dan protein setiap jenis makanan berdasarkan daftar konversi zat gizi.
- **Rata-rata pengeluaran Per kapita per bulan** diperoleh dengan membagi jumlah seluruh pengeluaran rumah tangga dengan jumlah seluruh anggota rumah tangga.

Taraf dan pola konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. Penghitungan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat menggunakan pendekatan pengeluaran perkapita per bulan atau per tahun. Pendekatan ini digunakan agar data yang diperoleh lebih representatif sehingga mampu menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Karena pada umumnya, responden sungkan menjelaskan mengenai pendapatan yang diterimanya secara menyeluruh.

6.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan nonmakanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi. Kelompok bukan makanan mencakup perumahan, pakaian, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dsb. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan.

Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Berikut disajikan data mengenai rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan pada setiap kelompok ekonomi masyarakat.

Tabel 6.1. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2020

Kelompok Pengeluaran	Kelompok Komoditas		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
40 Persen Terbawah	387 639	206 347	593 986
40 Persen Tengah	617 762	487 619	1 105 381
20 Persen Teratas	950 131	1 344 596	2 294 727
RATA-RATA KOLAKA	590 624	544 630	1 135 254

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

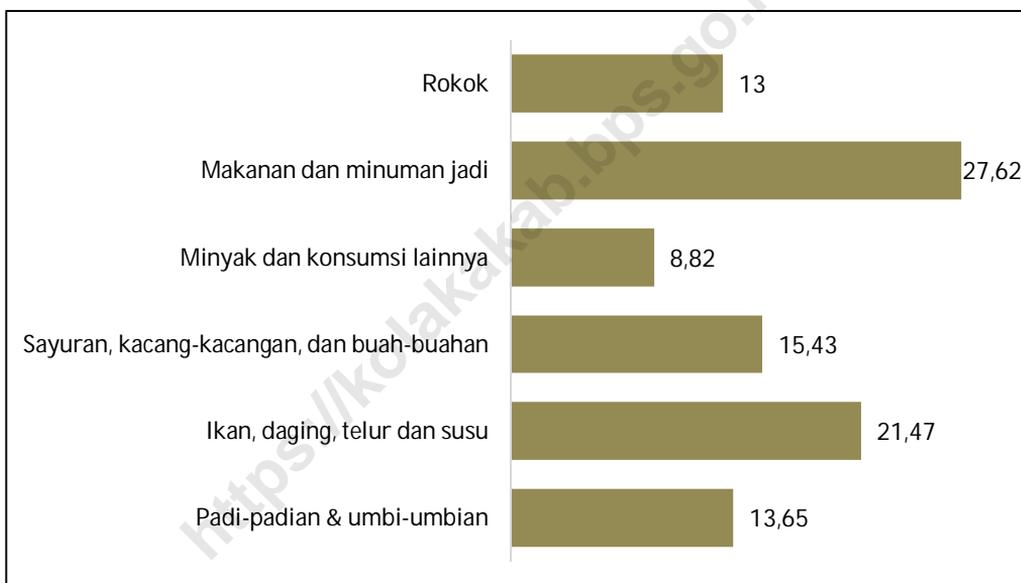
Tabel 6.1 diatas menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan masyarakat pada tahun 2020. Dari tabel tersebut diperoleh informasi bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat pada kelompok pengeluaran terendah per orang per bulannya adalah 593.986 rupiah. Nominal pengeluaran ini terus meningkat seiring dengan semakin besarnya rata-rata pengeluaran masyarakat di masing-masing kelompoknya. Hingga pada kelompok pengeluaran tertinggi, rata-rata biaya yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan nonmakanan masyarakat per kapita per bulan mencapai 2.294.727 rupiah.

Dari tabel di atas juga terlihat pola konsumsi masyarakat. Semakin tinggi kelompok pengeluaran (20 persen pengeluaran tertinggi), maka semakin besar pula pengeluaran untuk konsumsi komoditas nonmakanan. Pada kelompok pengeluaran terendah, dari rata-rata pengeluaran sebesar 593.986 rupiah per orang per bulan, sekitar 65,26 persen dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan. Sedangkan pada kelompok pengeluaran tertinggi, dari rata-rata pengeluaran 2.294.727 rupiah per orang per bulan, sekitar 58,60 persen dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan nonmakanan.

Secara lebih spesifik mengenai proporsi pengeluaran masing-masing jenis komoditas terhadap total konsumsi makanan masyarakat pada tahun 2020 disajikan dalam gambar 6.1. Dapat kita amati bahwa, sebesar 13,65 persen dari total pengeluaran makanan yang dikeluarkan

adalah untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok seperti padi-padian dan umbi-umbian. Untuk memenuhi kebutuhan akan protein seperti ikan, daging, telur, dan susu, menghabiskan proporsi pengeluaran sebesar 21,47 persen. Sedangkan rata-rata konsumsi masyarakat untuk rokok adalah sebesar 13,00 persen, tidak berbeda jauh dengan rata-rata pengeluaran untuk padi-padian dan umbi-umbian. Konsumsi yang memiliki proporsi terbesar terhadap total pengeluaran makanan masyarakat adalah untuk makanan dan minuman jadi yaitu mencapai 27,62 persen.

Gambar 6.1. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Kelompok Makanan (Persen), 2020

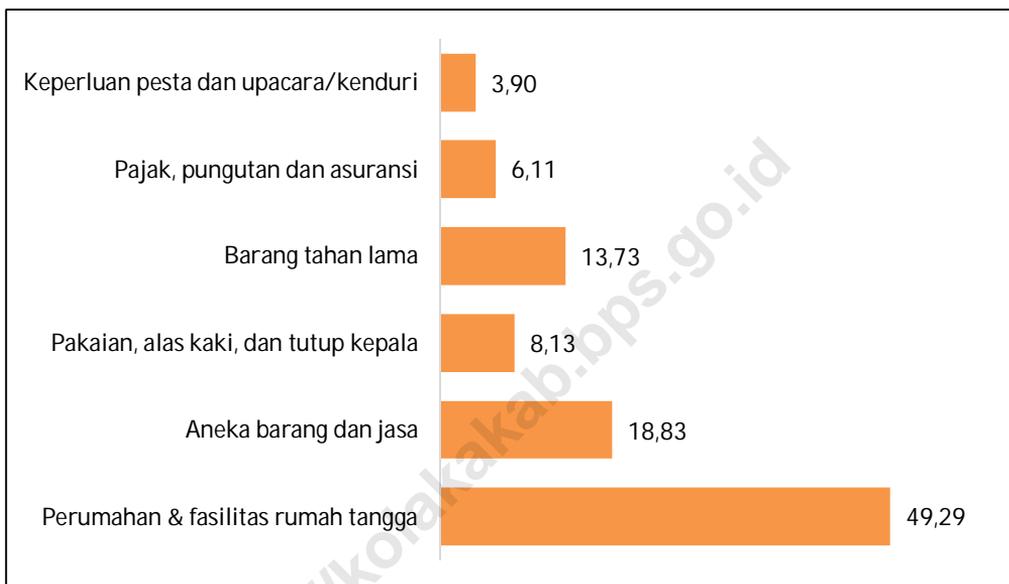


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Konsumsi kelompok bukan makanan masyarakat secara umum, 49,29 persennya digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga seperti listrik, air, bahan bakar, dan kendaraan bermotor. Proporsi terbesar kedua adalah untuk aneka barang dan jasa yaitu sebesar 18,83 persen. Aneka barang dan jasa mencakup perlengkapan kosmetik, biaya kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Selanjutnya rata-rata pengeluaran untuk konsumsi barang tahan lama berupa perlengkapan perabot rumah tangga, alat-alat dapur, perhiasan, alat elektronik rumah tangga, dll sebesar 13,73 persen. Untuk memenuhi kebutuhan sandang berupa pakaian, alas kaki dan tutup kepala menghabiskan 8,13 persen dari total pengeluaran nonmakanan. Sisanya adalah pengeluaran untuk biaya pajak, pungutan, dan asuransi serta

keperluan pesta dan upacara adat yang masing-masing memiliki proporsi 6,11 persen dan 3,90 persen. Informasi lebih lengkap dapat diamati melalui gambar 6.2.

Gambar 6.2. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Kelompok Bukan Makanan (Persen), 2020



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Secara teori ekonomi, semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk akan semakin tinggi pula persentase atau proporsi pengeluaran yang dibelanjakan untuk barang bukan makanan dan semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan. Berkaitan dengan teori tersebut, untuk mengamati fenomena yang terjadi di Kabupaten Kolaka, disajikan data rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat selama sebulan menurut jenis pengeluaran dan kelompok pengeluaran per kapita.

Tabel 6.2. Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Persen), 2020

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran			
	40 % terbawah	40 % tengah	20 % teratas	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	65,26	55,89	41,40	52,03
Padi-padian	10,90	7,40	3,71	6,65
Umbi-umbian	0,65	0,55	0,25	0,45
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	9,63	7,59	5,11	7,03
Daging	0,43	0,78	1,02	0,80
Telur & susu	3,84	3,28	3,13	3,34
Sayur-sayuran	4,31	3,47	2,08	3,09
Kacang-kacangan	0,90	0,76	0,57	0,71
Buah-buahan	3,74	3,88	4,82	4,23
Minyak & lemak	1,61	1,14	0,69	1,06
Bahan minuman	2,09	1,62	0,98	1,46
Bumbu-bumbuan	1,72	1,46	1,04	1,35
Konsumsi Lainnya	1,05	0,76	0,52	0,72
Makanan & minuman jadi	17,16	14,93	12,37	14,37
Rokok	7,22	8,27	5,09	6,76
Non makanan	34,74	44,11	58,60	47,97
Perumahan & Fasilitas RT	19,89	23,40	25,86	23,65
Aneka brg & jasa	7,42	9,47	9,47	9,03
Pakaian, alas kaki & tutup kepala	2,94	4,19	4,13	3,90
Barang tahan lama	1,88	2,57	12,87	6,59
Pajak, pungutan & asuransi	2,25	2,91	3,31	2,93
Keperluan pesta & upacara/kenduri	0,36	1,57	2,96	1,87
Total	100	100	100	100

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Pada kelompok pengeluaran masyarakat 40 persen terendah, konsumsi makanan yang terbesar terhadap seluruh pengeluaran adalah konsumsi makanan dan minuman jadi yang mencapai 17,16 persen. Selanjutnya diikuti oleh konsumsi padi-padian yang menghabiskan 10,90 persen dari total pengeluaran. Dan pada urutan ketiga yaitu konsumsi ikan/udang/cumi/kerang sebesar 9,63 persen.

Sementara itu, pada kelompok masyarakat berpengeluaran menengah memiliki pola yang sedikit berbeda. Konsumsi makanan dan minuman jadi masih menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 14,93 persen. Namun, posisi kedua ditempati oleh konsumsi rokok (8,27 persen), dan posisi ketiga ditempati oleh konsumsi ikan/udang/cumi/kerang (7,59 persen). Selanjutnya, kelompok masyarakat yang berpengeluaran tinggi. Konsumsi terbanyak adalah makanan dan minuman jadi (12,37 persen), kemudian konsumsi ikan/udang/cumi/kerang (5,11 persen) dan konsumsi rokok (5,09 persen) menempati urutan ketiga.

Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa, proporsi pengeluaran untuk rokok hampir setara dengan konsumsi makanan kebutuhan pokok seperti padi-padian. Bahkan pada kelompok masyarakat menengah ke atas ada masyarakat yang seolah-olah menjadikan rokok sebagai kebutuhan utamanya. Hal ini terlihat dari proporsi pengeluaran rokok yang lebih besar dibandingkan dengan konsumsi makanan pokok (padi-padian).

Proporsi terbesar pada konsumsi barang dan jasa (bukan makanan) masyarakat umumnya adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga. Selain itu, pola yang mencolok terlihat pada konsumsi kelompok barang tahan lama. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran masyarakat (kelompok pengeluaran terendah hingga tertinggi), semakin besar proporsi pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang tahan lama seperti meubelair, perlengkapan perabotan rumah tangga, perhiasan, dsb.

Pada kelompok 40 persen masyarakat berpengeluaran terendah, hanya 1,88 persen pengeluaran yang digunakan untuk barang tahan lama. Proporsinya terus meningkat hingga pada kelompok 40 persen masyarakat berpengeluaran menengah, sebesar 2,57 persen dari

pengeluaran yang digunakan. Sangat berbeda dengan kelompok masyarakat dengan pengeluaran terbesar, untuk memenuhi kebutuhan akan barang tahan lama, kelompok masyarakat ini menghabiskan 12,87 persen dari total pengeluarannya atau hampir seperlima dari seluruh pengeluaran makanan maupun nonmakanan yang mereka konsumsi.

6.2 Konsumsi Kalori dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2014), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein. Berikut data hasil Susenas 2020 mengenai konsumsi kalori dan protein per kapita per hari oleh masyarakat dikelompokkan menurut kelompok pengeluaran per kapita selama satu bulan.

Tabel 6.3. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Pengeluaran, 2020

Kelompok Pengeluaran	Kalori (kkal)	Protein (gram)
(1)	(2)	(3)
40 persen terbawah	1 916,26	54,26
40 persen tengah	2 518,25	74,89
20 persen teratas	2 910,53	92,63
Rata-rata Konsumsi Per kapita	2 351,79	70,05

Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Rata-rata konsumsi kalori penduduk sehari sebesar 2.351,79 kkal atau sudah memenuhi syarat kecukupan gizi yang ditentukan yaitu 2.150 kkal. Sebagaimana lazimnya di tengah masyarakat, konsumsi kalori

terbesar per kapita per hari berasal dari konsumsi padi-padian. Sementara itu, rata-rata konsumsi protein per kapita sehari tahun 2020 mencapai 70,05 gram. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, konsumsi protein penduduk sudah memenuhi kecukupan protein yang disyaratkan oleh Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi yaitu 57 gram.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk maka semakin baik pula kualitas gizi makanan yang dikonsumsi. Apabila diamati terkait ketercukupan kalori dan protein menurut kelompok pengeluaran per kapita per hari, kelompok masyarakat bawah umumnya belum memenuhi kebutuhan minimal konsumsi energi dan protein yang semestinya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk golongan ini masih belum menjadikan kebutuhan asupan kalori dan protein sebagai prioritas bagi anggota keluarganya.

<https://kolakakab.bps.go.id>

SOSIAL LAINNYA

Pengguna HP /Komputer

88,62 Persen



Mengakses Internet

50,97 Persen

Punya Aset Transportasi : 88,03 Persen

Punya Aset Fasilitas Ruta : 73,14 Persen



Konsep dan Definisi

- **Teknologi Informasi dan Komunikasi** dalam bahasan ini mencakup *smartphone*, komputer *desktop*, *laptop (portable)*, atau *tablet* (atau komputer genggam yang serupa).
- **Beras Sejahtera (rastra/raskin)** adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga miskin berupa pendistribusian beras khusus kepada keluarga miskin yang harganya telah di subsidi oleh pemerintah.
- **Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)** adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2015.
- **Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)** adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,- per KPM per bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan e-voucher tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-waroeng.
- **Program Indonesia Pintar (PIP)** melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
- **Program Keluarga Harapan (PKH)** merupakan upaya memberi perlindungan sosial bagi Keluarga Miskin (KM). Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta

PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sementara itu, kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

<https://kolakakab.bps.go.id>

Aspek sosial lain seperti akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator ukur kesejahteraan masyarakat. Perkembangan gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang diperoleh melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Jenis akses dan media informasi yang beragam tentunya menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengikuti tren gaya hidup modern. Semakin terjangkaunya harga telepon pintar dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan internet, semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang mereka inginkan.

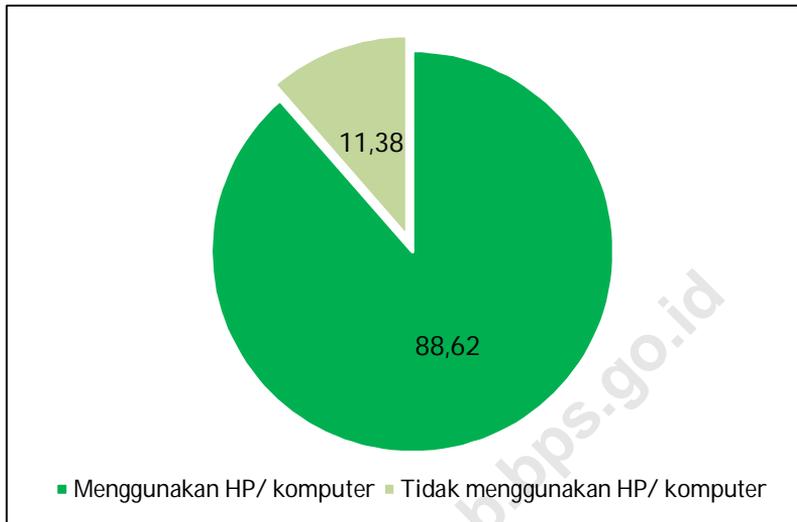
Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti program perlindungan sosial, serta kepemilikan aset/barang berharga oleh masyarakat. Semakin merata penyaluran program perlindungan sosial, semakin mempermudah masyarakat kelompok menengah kebawah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dan dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

7.1 Akses Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Perkembangan telepon seluler yang semakin canggih dan mudah didapat cenderung berdampak kepada menurunnya kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon rumah. Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dsb.

Pada tahun 2020 penggunaan telepon seluler (HP)/ komputer oleh penduduk berusia lima tahun ke atas mencapai 88,62 persen. Artinya, pada tahun 2020, setiap 100 orang usia lima tahun ke atas, 88 orang diantaranya sudah menggunakan HP/ komputer. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, penggunaan HP/ komputer di Kolaka sebesar 84,85 persen. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengingat kebutuhan akan informasi dan komunikasi serta pemenuhan kebutuhan gaya hidup masyarakat yang mulai meluas hingga ke dunia maya.

Gambar 7.1. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Keatas Menurut Penggunaan Teknologi Informasi (Persen), 2020

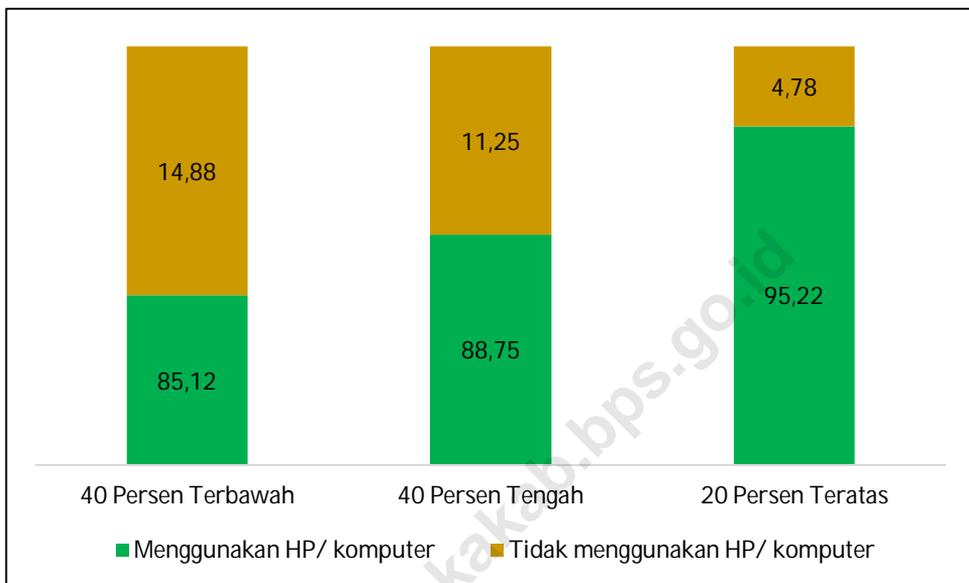


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Kita juga bisa melihat bagaimana pola penggunaan HP/ komputer ini pada masing-masing kelompok ekonomi masyarakat. Penggunaan teknologi informasi ini masih erat korelasinya dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Jelas saja dikarenakan untuk kepemilikannya pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada kelompok masyarakat ekonomi bawah masih ada 14 hingga 15 orang dari setiap 100 orang di kelompoknya yang tidak pernah mengakses teknologi informasi selama tiga bulan terakhir. Sedangkan pada kelompok masyarakat ekonomi teratas, hanya 4 hingga 5 orang dari setiap 100 orang usia lima tahun ke atas di kelompoknya yang tidak mengakses HP/ komputer selama tiga bulan terakhir.

Namun ada fenomena yang cukup menarik ketika memperhatikan lebih jauh lagi grafik yang tersaji pada gambar 7.2. Meskipun taraf ekonomi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akses teknologi informasi, kelompok masyarakat ekonomi bawah yang sudah menjangkau akses terhadap HP/ komputer mencapai angka 85,12 persen. Artinya, dapat dikatakan bahwa akses terhadap teknologi ini sudah hampir menjadi kebutuhan bagi semua kalangan.

Gambar 7.2. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Keatas Menurut Kelompok Pengeluaran dan Penggunaan Teknologi Informasi (Persen), 2020

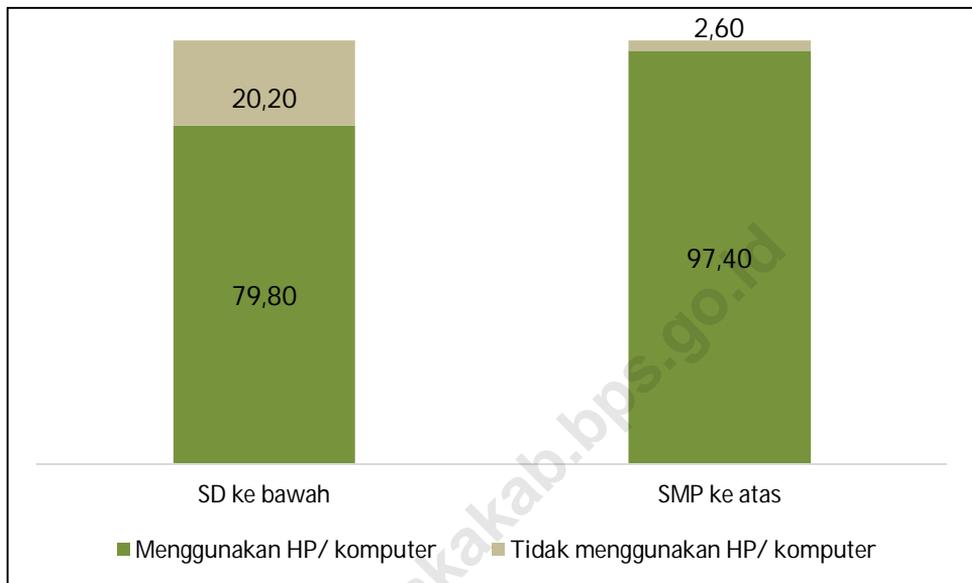


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Ketika diamati berdasarkan jenis kelamin Kepala Rumah Tangga, persentase pengguna HP/ komputer hampir sama. Namun, jika dibandingkan dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh Anggota Rumah Tangga, terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Untuk masyarakat usia lima tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan SD, atau yang tidak pernah bersekolah, atau yang pernah sekolah namun tidak menamatkan jenjang SD, sebesar 79,80 persen diantaranya sudah memperoleh akses teknologi informasi melalui HP/ komputer.

Sedangkan pada kelompok masyarakat yang pendidikan terakhirnya SMP ke atas, setidaknya 97 hingga 98 orang dari setiap 100 orang sudah mendapatkan akses terhadap teknologi informasi, baik melalui HP maupun komputer.

Gambar 7.3. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Penggunaan Teknologi Informasi (Persen), 2020



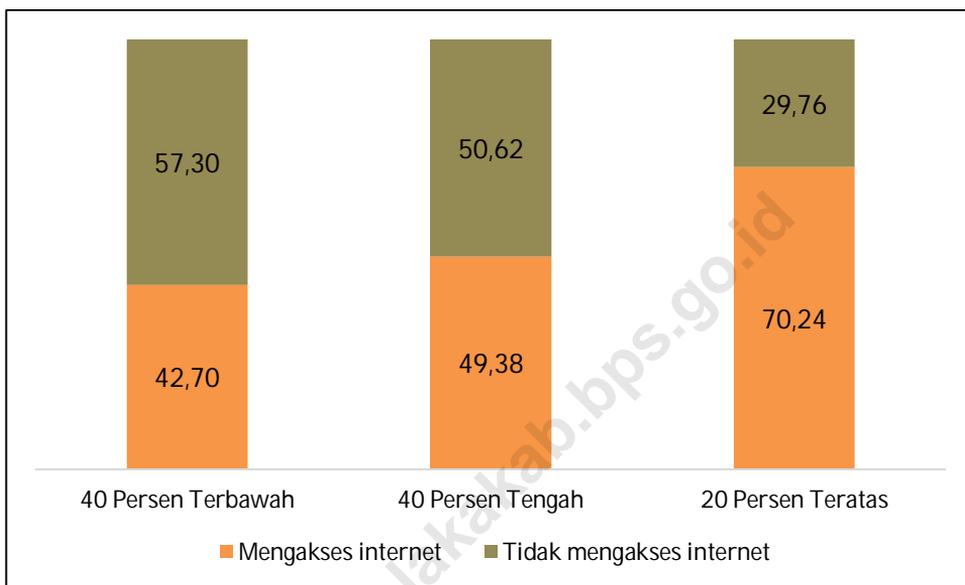
Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Sarana Teknologi informasi dan komunikasi lainnya adalah internet. Sama halnya dengan penggunaan telepon genggam, pemanfaatan akses internet juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, hanya 43,91 persen penduduk yang menggunakan/memanfaatkan akses internet. Persentase ini meningkat menjadi 50,97 persen pada tahun 2020.

Fakta ini tidak mengherankan, perkembangan dan perluasan jaringan internet semakin gencar dilakukan. Ditambah lagi dengan peluncuran proyek palapa ring oleh pemerintah yang akan terus meningkatkan jangkauan jaringan internet hingga menjangkau seluruh nusantara. Proyek infrastruktur komunikasi dan informatika yang dikenal juga dengan istilah 'tol langit' ini akan menjadi proyek akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu. Selain itu juga bisa memberikan jaminan kualitas internet dan komunikasi yang berkualitas tinggi, aman, dan murah. Hal ini berarti, ketika pengerjaan proyek ini sudah sampai ke pulau Sulawesi, sedikit banyaknya tentu akan ada dampak kemajuan yang dirasakan oleh

masyarakat Kabupaten Kolaka.

Gambar 7.4. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Keatas Menurut Kelompok Pengeluaran dan Akses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir (Persen),2020

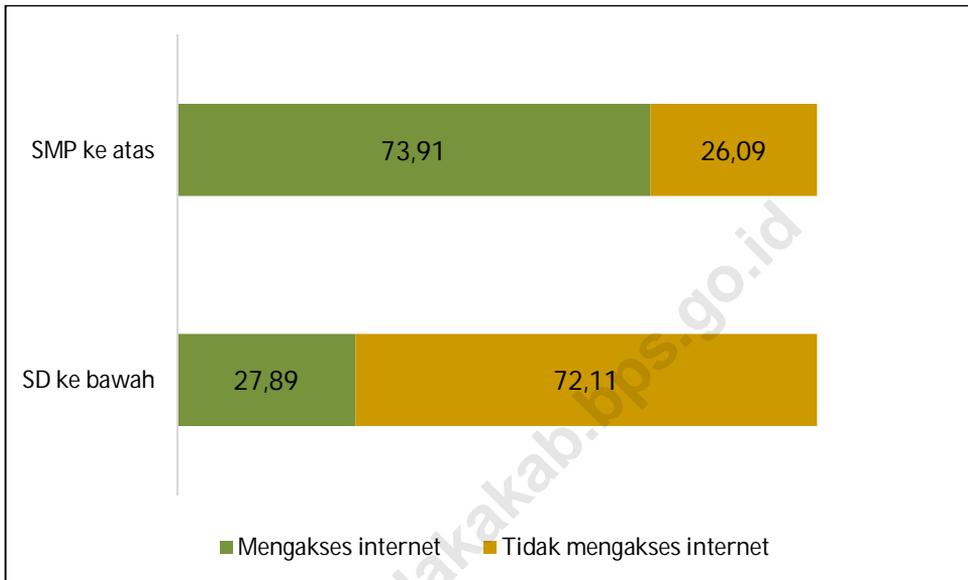


Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Pada gambar 7.4 disajikan pola penggunaan akses internet oleh penduduk usia lima tahun ke atas yang dikelompokkan menurut tingkatan ekonomi masyarakat. Terlihat berbeda dengan data penggunaan/akses teknologi informasi pada masyarakat ekonomi bawah yang sudah mencapai 85,12 persen, namun yang menggunakan internet hanya 42,70 persen. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk usia lima tahun ke atas di kelompok masyarakat ekonomi bawah, baru 42 hingga 43 orang saja yang mengakses internet dikesehariannya.

Dari grafik tersebut juga terlihat bahwa semakin tinggi status ekonomi masyarakat, kecenderungannya untuk menggunakan/akses terhadap internet juga semakin tinggi. Kelompok masyarakat yang paling sedikit persentasenya dalam penggunaan internet adalah kelompok masyarakat ekonomi bawah. Pada kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas, secara berturut-turut, pengguna akses internet yaitu 49,38 persen dan 70,24 persen dari total masyarakat di kelompoknya masing-masing.

Gambar 7.5. Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Keatas yang Mengakses Internet Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir (Persen), 2020



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Selain itu, kita juga dapat mengamati karakteristik penggunaan internet oleh masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Dari grafik yang disajikan pada gambar 7.5 terlihat perbedaan yang signifikan antara kelompok masyarakat dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah dan pendidikan tertinggi SMP ke atas. Hanya 27,89 persen penduduk usia lima tahun ke atas yang berpendidikan tertinggi SD atau tidak tamat SD yang mengakses internet. Sementara itu, pada kelompok masyarakat dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMP ke atas, lebih dari separuhnya sudah tersentuh dengan dunia internet, yaitu mencapai 73,91 persen. Dengan kata lain, dari setiap 100 orang masyarakat dengan pendidikan tertinggi SMP ke atas, 73 hingga 74 orang diantaranya mengakses internet selama tiga bulan terakhir.

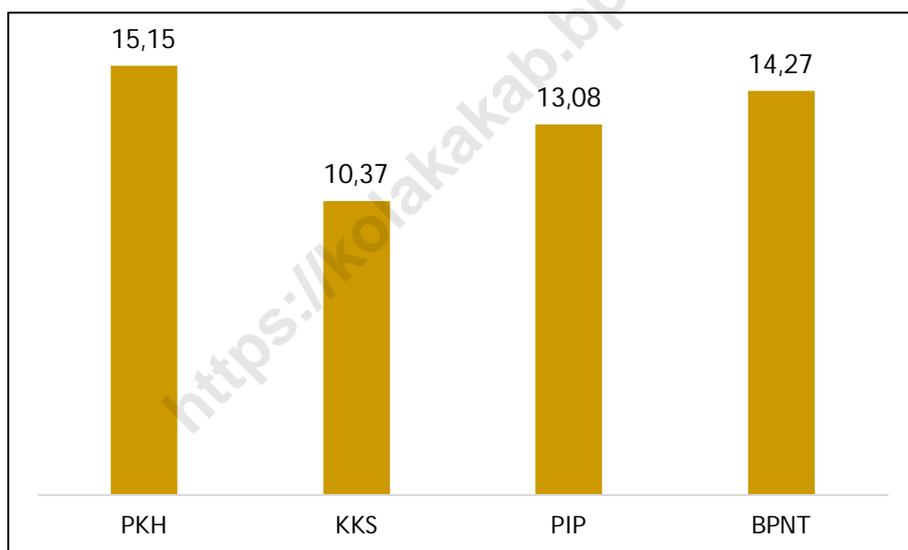
7.2 Program Perlindungan Sosial

Pemerintah dalam melaksanakan program-programnya banyak memberikan fasilitas untuk rakyat miskin guna meringankan beban rumah

tangga miskin, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Beras Miskin (Raskin)/ Beras Sejahtera (Rastra).

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 menunjukkan bahwa, terdapat sekitar 15,15 persen rumah tangga yang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk program Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terdapat 10,37 persen. Sedangkan Program Indonesia Pintar (PIP) diterima oleh 13,08 persen dari total rumah tangga.

Gambar 7.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima (Persen), 2020



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

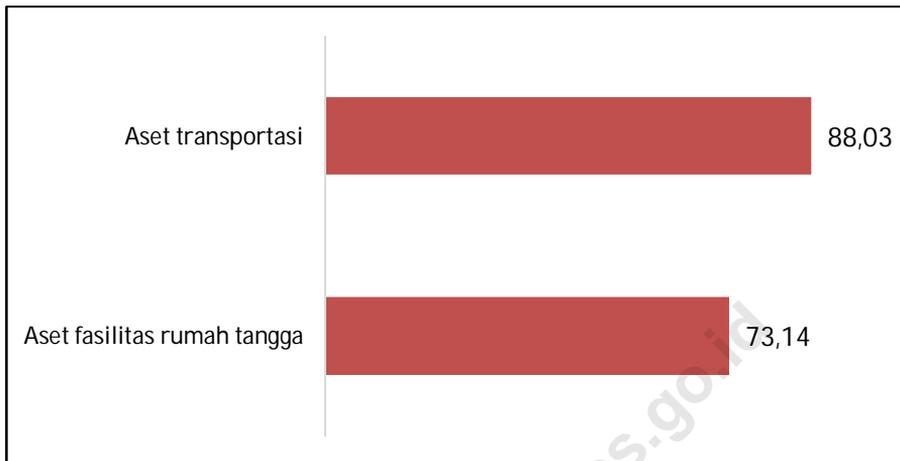
Pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog/Dolog) melaksanakan program pengadaan beras murah atau beras sejahtera (rastra) yang ditujukan bagi masyarakat miskin agar tercukupi kebutuhan pangannya. Selain berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, program raskin juga berguna untuk mengendalikan inflasi melalui intervensi pemerintah, dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar 0 rupiah, dan menjaga stok pangan nasional.

Pemerataan untuk program raskin/rastra diterapkan oleh pemerintah daerah kepada seluruh rumah tangga yang membutuhkan. Pada tahun 2020, sebanyak 14,27 persen rumah tangga menerima bantuan berupa beras sejahtera (dengan pemerataan) dengan biaya 0 rupiah. Selain program perlindungan sosial di atas, program perlindungan sosial lainnya yang diterima masyarakat baik dari pemerintah/ BUMN/ swasta yaitu jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, asuransi kematian, dan pemberian pesangon saat ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pada tahun 2020 sebanyak 14,84 persen rumah tangga memiliki asuransi seperti asuransi kecelakaan kerja/asuransi kematian/pesangon saat PHK. Sedangkan untuk jaminan pensiun/hari tua dimiliki oleh 14,10 persen rumah tangga.

7.3 Kepemilikan Aset Oleh RumahTangga

Kepemilikan aset menjadi profil yang dapat menggambarkan kualitas kehidupan masyarakat. Karena pada umumnya, kepemilikan berbagai jenis aset diperoleh masyarakat setelah mereka mampu/merasa akan mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan, dan papan. Aset fasilitas rumah tangga yang dicakup dalam survei ini meliputi lemari es/kulkas, Air Conditioner (AC), Pemanas air/Heater (bukan dispenser), televisi layar datar minimal 30 inci, tabung gas 12 kg, dan telepon rumah. Dari gambar 7.7 terlihat bahwa, untuk kepemilikan aset fasilitas rumah tangga, dari setiap 100 rumah tangga, setidaknya 73 rumah tangga di antaranya memiliki minimal satu jenis aset fasilitas rumah tangga sebagaimana dirincikan sebelumnya.

Gambar 7.7. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset Menurut Jenis Aset (Persen),2020



Sumber: Hasil Olah Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Adapun yang dimaksud aset transportasi yang dimiliki rumah tangga disini yaitu meliputi sepeda motor, perahu, perahu motor, dan mobil. Sekitar 88,03 persen rumah tangga di Kolaka mempunyai minimal satu jenis aset transportasi.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2019*. Kolaka: BPS Kabupaten Kolaka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2020*. Kolaka: BPS Kabupaten Kolaka.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Pedoman Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas Maret 2020)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka. 2020. *Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2020*. Kolaka: BPS Kabupaten Kolaka.

<https://kolakakab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA**

Jl. Pahlawan No.75, Lamokato, Kolaka, Kabupaten Kolaka,
Provinsi Sulawesi Tenggara 93511, Telepon: (0405) 2321031